

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN KURIKULUM MERDEKA
PADA MADRASAH TSANAWIYAH NEGERI 1 LAMPUNG BARAT**

Tesis

Oleh

DEWI LILIANI

NPM 2226061012



PROGRAM PASCASARJANA MAGISTER ILMU ADMINISTRASI

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNIVERSITAS LAMPUNG

2025

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN KURIKULUM MERDEKA
PADA MADRASAH TSANAWIYAH NEGERI 1 LAMPUNG BARAT**

Oleh

DEWI LILIANI

NPM 2226061012

Tesis

**Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mencapai Gelar
MAGISTER ILMU ADMINISTRASI**

Pada

**Program Pascasarjana Magister Ilmu Administrasi
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik**



**PROGRAM PASCASARJANA MAGISTER ILMU ADMINISTRASI
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS LAMPUNG**

2025

ABSTRAK

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN KURIKULUM MERDEKA PADA MADRASAH TSANAWIYAH NEGERI 1 LAMPUNG BARAT

Oleh

Dewi Liliani

Penilaian Asesmen Kompetensi Siswa Indonesia (AKSI) menyoroti rendahnya kompetensi dasar siswa dan menunjukkan hasil belajar tidak mengalami peningkatan yang signifikan dalam kurun waktu 20 tahun terakhir. Salah satu inovasi untuk meningkatkan kualitas pendidikan yaitu implementasi kurikulum Merdeka. Madrasah Tsanawiyah Negeri 1 Lampung Barat merupakan salah satu lembaga pendidikan yang memiliki peran penting dalam Implementasi Kurikulum Merdeka. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi Kurikulum Merdeka di Madrasah Tsanawiyah Negeri 1 Lampung Barat dan tantangan yang dihadapi dalam mengimplementasikan Kurikulum Merdeka. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif melibatkan observasi, wawancara, dan dokumentasi sebagai teknik pengumpulan data. Hasil penelitian menggunakan teori Edward III yaitu komunikasi yang belum maksimal, sumber daya yang sudah memadai, sikap pelaksana telah memiliki komitmen yang baik, dan struktur birokrasi sudah terlaksana, namun perlu adanya SOP pelaksanaan P5 yang lebih terstruktur. Terdapat beberapa tantangan yang dihadapi seperti fleksibilitas waktu, cara berfikir wali siswa yang belum terbuka terhadap perubahan, personalitas pendidik dan media pembelajaran di era digital. Penelitian ini merekomendasikan peningkatan pelatihan rutin, optimalisasi komunikasi dan pemanfaatan teknologi serta evaluasi berkala untuk mendukung pelaksanaan kurikulum. Temuan ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi madrasah dan pembuat kebijakan dalam meningkatkan kualitas pendidikan melalui Kurikulum Merdeka.

Kata kunci: Implementasi Kebijakan, Kurikulum Merdeka, Madrasah Tsanawiyah.

ABSTRACT

IMPLEMENTATION OF INDEPENDENT CURRICULUM POLICY AT STATE TSANAWIYAH MADRASAH 1, WEST LAMPUNG

By

Dewi Liliani

The Indonesian Student Competency Assessment (AKSI) highlighted the low level of students' basic competencies and showed that learning outcomes have not shown significant improvement in the past 20 years. One innovation to improve the quality of education is the implementation of the Merdeka curriculum. Madrasah Tsanawiyah Negeri 1 West Lampung is one of the educational institutions that plays a crucial role in the implementation of the Merdeka Curriculum. This study aims to analyze the implementation of the Merdeka Curriculum at Madrasah Tsanawiyah Negeri 1 West Lampung and the challenges faced in implementing the Merdeka Curriculum. The research method used was qualitative, involving observation, interviews, and documentation as data collection techniques. The results of the study using Edward III's theory include suboptimal communication, adequate resources, good commitment from implementers, and an established bureaucratic structure. However, a more structured SOP for implementing P5 is needed. Several challenges are faced, such as time flexibility, parents' mindsets that are not yet open to change, educator personalities, and learning media in the digital era. This study recommends increasing routine training, optimizing communication and technology utilization, and conducting regular evaluations to support curriculum implementation. These findings are expected to serve as a reference for madrasas and policymakers in improving the quality of education through the Independent Curriculum.

Keywords: Policy Implementation, Independent Curriculum, Junior High Schools.

Judul Tesis : **IMPLEMENTASI KEBIJAKAN
KURIKULUM MERDEKA PADA
MADRASAH TSANAWIYAH NEGERI 1
LAMPUNG BARAT**

Nama Mahasiswa : **Dewi Liliyani**

NPM : **2226061012**

Program Studi : **Magister Ilmu Administrasi**

Fakultas : **Ilmu Sosial dan Ilmu Politik**



Prof. Dr. Bambang Utoyo S, M.Si.
NIP. 196302061988031002

Dr. Ani Agus Puspawati, S.AP., M.A.P.
NIP. 198308152010122002

2. **Ketua Program Studi Magister Ilmu Administrasi
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Lampung**

A large, stylized black ink signature is written over the text of the Dean's position.

Dr. Satripto, S.Sos., M.AB
NIP. 196902261990031001

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua

Prof. Dr. Bambang Utoyo S, M.Si



Sekretaris

Dr. Ani Agus Puspawati, S.AP., M.A.P.



Penguji Utama

Dr. Dedy Hermawan, S.Sos., M.Si.



2.

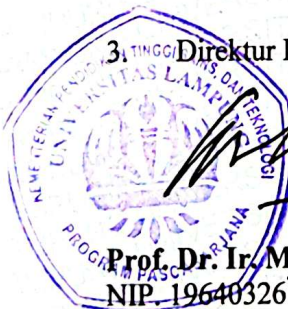
Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik



Prof. Dr. Anna Gustian Zainal, S.Sos., M.Si.
NIP. 197608212000032001

3.

Direktur Program Pascasarjana Universitas Lampung



Prof. Dr. Ir. Murhadi, M.Si.
NIP. 196403261989021001

Tanggal Lulus Ujian Tesis: 23 Juli 2025

PERNYATAAN KEASLIAN TESIS DAN HAK INTELEKTUAL

Saya menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

1. Tesis dengan judul “Implementasi Kebijakan Kurikulum Merdeka Pada Madrasah Tsanawiyah Negeri 1 Lampung Barat” adalah hasil karya sendiri dan saya tidak melakukan penjiplakan atau pengutipan atas karya penulis lain dengan cara yang tidak sesuai dengan etika ilmiah yang berlaku dalam masyarakat akademik atau yang disebut *plagiarisme*.
2. Hal intelektual atas karya ilmiah ini diserahkan sepenuhnya kepada Universitas Lampung.

Atas pernyataan ini, apabila di kemudian hari ternyata ditemukan adanya ketidakbenaran, saya bersedia menanggung akibat dan sanksi yang diberikan kepada saya. Saya juga bersedia dan sanggup dituntut sesuai dengan hukum yang berlaku.

Bandar Lampung, 23 Juli 2025

Yang membuat pernyataan,



Dewi Liliani
NPM. 2226061012

RIWAYAT HIDUP



Dewi Liliani, lahir di Bandar Lampung, 1 Maret 1993 buah hati dari pasangan Ayahanda “**Aswani**” dan Ibunda “**Murniati**”.

Penulis pertama kali menempuh pendidikan formal di MIN Sinar Semendo dan diselesaikan tahun 2003. Pada tahun yang sama penulis melanjutkan jenjang pendidikan menengah pertama di SMP Negeri 19 Bandar Lampung lulus tahun 2007 dan Pendidikan menengah atas di SMA Negeri 9 Bandar Lampung yang diselesaikan tahun 2010. Pada tahun 2010, penulis diterima sebagai salah satu mahasiswa di Jurusan Ilmu Administrasi Negera, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Padjadjaran dan selesai tahun 2014. Alhamdulillah pada tahun 2022, penulis kembali diberikan amanah untuk melanjutkan pendidikan di Program Pascasarjana Magister Ilmu Administrasi Universitas Lampung.

Penulis saat ini bekerja di MTs Negeri 1 Lampung Barat sebagai Guru dengan latar belakang Pendidikan Sarjana Administrasi Publik sehingga memotivasi penulis untuk meneruskan Pendidikan.

MOTTO

***“MAKA INGATLAH KEPADAKU, AKU PUN AKAN INGAT KEPADAMU.
BERSYUKURLAH KEPADAKU DAN JANGANLAH KAMU INGKAR
KEPADAKU***

- Q.S Al- Baqarah: 152 -

***"CUKUPLAH ALLAH MENJADI PENOLONG KAMI DAN ALLAH
ADALAH SEBAIK-BAIK PELINDUNG"***

- Q.S Ali Imran: 173 -

***“SESUNGGUHNYA SESUDAH KESULITAN ITU ADA
KEMUDAHAN”***

- Q.S Al- Insyirah: 5-6 -

“KUN FAYAKUN”

PERSEMBAHAN



Kupersembahkan tesis ini kepada:

*Suami ku tercinta dan tersayang yang telah menjadi support system terbaik
hingga mampu sampai dengan titik ini.*

*Ibuku dan Almarhum Ayahanda tercinta sebagai pengingat dan semangat
untuk menyelesaikan kuliah ini.*

*Kakang dan kakakku tersayang yang selalu mendukung dan mendokakan
adikmu ini.*

*Keponakan-keponakan ku yang selalu mendoakan dan support tantenya ini
dalam setiap perjalanan kuliah ini.*

Terimakasih untuk segala dukukungan serta doa yang telah diberikan....

*Izinkan karya ini ku persembahkan kepada kalian, semoga menjadi salah satu
wujud baktiku.*

Serta

Almamaterku Tercinta

SANWACANA



Alhamdulillah atas berkah rahmat dan ridho-Nya penulis telah menyelesaikan naskah tesis dengan judul **“IMPLEMENTASI KEBIJAKAN KURIKULUM MERDEKA PADA MADRASAH TSANAWIYAH NEGERI 1 LAMPUNG BARAT”** sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Magister di Program Pascasarjana Magister Ilmu Administrasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Lampung. Penulis sangat menyadari bahwa dalam kepenulisan naskah tesis sangat jauh dari kata sempurna, maka dari itu dalam prosesnya banyak mendapatkan bantuan dari berbagai pihak baik langsung maupun tidak langsung. Penulis mengharapkan penelitian ini dapat menjadi langkah awal bagi peneliti di masa mendatang untuk mengembangkan topik serupa dalam objek yang berbeda.

Pada kesempatan ini, izinkan penulis menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada:

1. Ibu Prof. Dr. Ir. Lusmeilia Afriani, D.E.S., I.P.M. selaku Rektor Universitas Lampung
2. Bapak Prof. Dr. Ir. Murhadi, M.Si. selaku Direktur Program Pascasarjana Universitas Lampung
3. Ibu Prof. Dr. Anna Gustiana Z., S.Sos., M.Si. selaku Dekan FISIP Universitas Lampung
4. Bapak Dr. Suropto, S.Sos., M.AB. selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Administrasi FISIP Universitas Lampung
5. Bapak Prof. Dr. Bambang Utoyo S., M.Si. sebagai Pembimbing Utama yang telah banyak memberikan masukan, kritik, dan saran secara substansial yang membangun dan bermanfaat dalam penyusunan tesis.

6. Ibu Dr. Ani Agus Puspawati, S.AP., M.A.P., sebagai Pembimbing Pendamping yang telah banyak memberikan masukan, kritik, dan saran secara kepenulisan dan substansial yang bermanfaat dalam penyusunan tesis.
7. Bapak Dr. Dedy Hermawan, S.Sos., M.Si., sebagai Penguji telah banyak memberikan masukan, kritik, dan saran secara kepenulisan dan substansial yang bermanfaat dalam penyusunan tesis.
8. Segenap Dosen Magister Ilmu Administrasi, FISIP, UNILA dan Staf Sekretariat. Terkhusus Mba Vivi selaku staf sekretariat yang selalu membantu berbagai hal administrasi dan lainnya selama proses menyelesaikan studi.
9. Suami Tercinta **Arian Solo Dasabayu** yang telah memberikan seluruh kasih dan sayang, cinta, do'a, dorongan, motivasi, *support* materiil dan non-materiil dan segalanya dalam hidup penulis dan dalam proses pendidikan hingga sampai dititik ini. Terimakasih karena telah menjadi suami yang terbaik mendukung segala kondisi baik suka maupun duka dan selalu sabar menghadapi segala hal.
10. Kedua orang tua tercinta Ibuku dan (Alm) Bapak yang telah memberikan do'a, dorongan, motivasi, *support* non-materiil dan segalanya dalam hidup penulis dan dalam proses pendidikan hingga sampai dititik ini.
11. Kedua mertuaku Ayah dan Ibu tersayang yang tiada hentinya mendoakan dan memberikan dukungan kepadaku sampai dengan dititik ini.
12. Kakang dan Kakak-kakaku serta ayuk ipar dan adik ipar ku tersayang yang selalu mendukung dan mendoakan agar adikmu ini dapat menyelesaikan kuliahnua.
13. Keponakan-keponakan kan ku Atha, Aya, Zivana, Iban, Zikri, Nayla dan Olin yang selalu support dan mendoakan tantenya dalam setiap perjalanan menyelesaikan kuliah ini.
14. Segenap rekan di Magister Ilmu Administrasi angkatan 22 Putri, Vike, Fajar adi, Aghis, Helen, Yuyun, Nur, Mba Ira, Mba Riska, alfajar, dan Jaya yang selalu memberikan semangat , nasehat dan membersamai dalam perkuliahan hingga menyelesaikan kuliah ini.

15. Teman – teman Kantorku Mba Ratna, Reni, Mba Ana, Mba Witra, Ngah Riswani, Mba Septi dan Ngah Nila yang selalu memberikan support dan doa terhadap penulis, hingga penulis dapat menyelesaikan studi ini.
16. Ibu Desi Arisandi, M.M.Pd. selaku kepala Madrasah dan seluruh Bapak/ Ibu Guru dan Staff MTs Negeri 1 Lampung Barat yang selalu memeberikan dukungan, doa dan semangat dalam setiap Langkah penulis untuk menyelesaikan studi ini.
17. Kepada Diriku “**Dewi Liliani**”, terimakasih telah kuat dan bertahan dalam setiap apa yang kamu hadapi, terimakasih untuk tidak menyerah dan terimakasih untuk selalu bisa menjadi waras.

Semoga Allah SWT. memberikan keberkahan dan keridhoan atas apa yang kita usahakan, dan Rasulullah Muhammad SAW. mengakui kita sebagai umatnya (kelak), Aamiin.

Bandar Lampung, 23 Juli 2025

Dewi Liliani

DAFTAR ISI

	Halaman
DAFTAR ISI.....	ii
DAFTAR GAMBAR.....	iv
DAFTAR TABEL	v
 I PENDAHULUAN	 1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	10
1.3 Tujuan Penelitian.....	10
1.4 Manfaat Penelitian.....	10
1.4.1 Manfaat Teoritis	10
1.4.2 Manfaat Praktis	11
 II TINJAUAN PUSTAKA.....	 12
2.1 Penelitian Terdahulu	12
2.2 Kebijakan Publik	14
2.3 Implementasi Kebijakan Publik	16
2.3.1 Unsur – Unsur Implementasi Kebijakan	16
2.4 Model-Model Implementasi Kebijakan Publik	18
2.5 Panduan Implementasi Kurikulum Merdeka Madrasah	26
2.5.1 Kurikulum Madrasah Tsanawiyah	29
2.5.2 Struktur Kurikulum Merdeka Pada Madrasah Tsanawiyah	29
2.6 Kerangka Berpikir	33
 III METODE PENELITIAN	 35
3.1 Pola Penelitian.....	35
3.2 Fokus Penelitian	35
3.3 Lokus Penelitian.....	36
3.4 Sumber Data Penelitian	37
3.5 Informan Penelitian	37
3.6 Teknik Pengumpulan Data	39
3.7 Teknik Analisis Data	40
3.8 Teknik Keabsahan Data	42
 IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....	 44
4.1 Gambaran Umum	44
4.1.1 Visi, Misi dan Tujuan.....	48
4.1.2 Struktur Organisasi	52
4.1.3 Muatan Kurikulum	53

4.2 Hasil Penelitian	55
4.2.1 Implementasi Kurikulum Merdeka pada Madrasah Tsanawiyah Negeri 1 Lampung Barat dengan menggunakan teori Edward III (1980)	57
4.2.2 Tantangan yang dihadapi dalam Implementasi Kurikulum Merdeka pada MTs N 1 Lampung Barat.....	68
4.3 Pembahasan.....	73
4.3.1 Implementasi Kurikulum Merdeka pada Madrasah Tsanawiyah Negeri 1 Lampung Barat dengan menggunakan teori Edward III (1980)	74
4.3.2 Tantangan yang dihadapi dalam Implementasi Kurikulum Merdeka pada MTs N 1 Lampung Barat.....	88
V KESIMPULAN DAN SARAN	92
5.1 Kesimpulan	92
5.2 Saran.....	93

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR GAMBAR

Halaman

1.1 Peta Konten dalam Pengimplementasian Kurikulum Merdeka pada Madrasah.....	4
1.2 Skema Mekanisme Implementasi Kurikulum Merdeka pada Madrasah.	6
2.1 Model Implementasi Kebijakan	22
2.2 Model Implementasi Kebijakan (2)	24
2.3 Model Implementasi Kebijakan (3)	26
2.4 Kerangka Berpikir.....	34
3.1 Model Analisis Data Interaktif.....	42
4.1 Struktur Organisasi	52

DAFTAR TABEL

	Halaman
1.1 Kegiatan yang dapat dilakukan Madrasah dalam Implementasi Kurikulum Merdeka.....	7
1.2 Jumlah Guru MTs N 1 Lampung Barat.....	8
1.3 Daftar pelatihan-pelatihan mengenai Kurikulum Merdeka.....	9
2.1 Penelitian Terdahulu.....	12
2.3 Struktur Kurikulum Merdeka Pada MTs (Madrasah Tsanawiyah).....	31
3.1 Informan Penelitian.....	38
4.1 Pendidik.....	45
4.2 Tenaga Kependidikan.....	46
4.3 Jumlah Pelajar.....	46
4.4 Jumlah Pelajar Pertama.....	47
4.5 Muatan / Struktur Kurikulum Alokasi Waktu Mata pelajaran MTs Kelas VII.....	54
4.6 Matriks Implementasi Kebijakan Kurikulum Merdeka Pada MTs Negeri 1 Lampung Barat.....	85

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pendidikan merupakan aspek krusial dalam pembangunan suatu negara, karena memiliki peran penting dalam mencetak sumber daya manusia yang berkualitas dan kompeten. Pemerintah Indonesia terus melakukan reformasi pendidikan untuk menjawab tantangan zaman dan memastikan pendidikan yang relevan dengan kebutuhan masyarakat serta perkembangan global. Pendidikan memiliki peranan yang sangat penting dalam mewujudkan cita-cita bangsa Indonesia sebagaimana tercantum dalam alinea keempat Undang-Undang Dasar 1945 yaitu "Mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut serta dalam mewujudkan ketertiban dunia yang didasarkan pada kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial". Selain itu, pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab (Hermanto, 2020).

Pada saat ini keadaan yang berubah secara cepat dan kompleks membuat pendidikan selalu dituntut untuk dapat berkembang mengikuti perkembangan zaman. Kemajuan teknologi, perubahan sosial, dan tantangan dunia yang ada pendidikan harus bisa menyiapkan generasi muda tidak hanya dengan pengetahuan, melainkan juga dengan kemampuan berpikir kritis, kreativitas, kolaborasi, dan adaptabilitas. Oleh karena itu salah satu unsur yang sangat penting dalam pelaksanaan pendidikan nasional tersebut adalah kurikulum (Amiruddin dkk, 2023).

Kualitas dan standar pendidikan secara signifikan terhubung dengan kurikulum karena kurikulum berperan sebagai panduan dalam penyelenggaraan pendidikan untuk mencapai tujuan yang ditetapkan. Upaya pengembangan kurikulum merupakan kegiatan yang mencakup penyusunan, pelaksanaan, evaluasi, dan penyempurnaan kurikulum. Sehingga, pengembangan kurikulum bertujuan untuk membuat perubahan pada kurikulum yang lebih sesuai dengan zamannya (Amiruddin, 2023). Oleh karena itu, perubahan kebijakan kurikulum menjadi langkah penting untuk mengikuti perubahan zaman dan menyesuaikan diri dengan kebutuhan pendidikan yang berkembang.

Krisis pembelajaran yang terjadi di Indonesia membawa perubahan pada pendidikan di negara ini. Pendidikan yang awal mulanya dilakukan secara tatap muka beralih menjadi pembelajaran jarak jauh (PJJ), sehingga pemerintah kembali melakukan perubahan kurikulum dengan mengeluarkan kebijakan terkait tiga opsi penggunaan kurikulum bagi satuan pendidikan yakni Kurikulum K13, Kurikulum Darurat, dan Kurikulum Merdeka. Langkah ini dilakukan sebagai adaptasi terhadap kondisi pandemi Covid-19. Kurikulum merdeka awalnya merupakan kurikulum prototipe yang diberlakukan pada 2500 sekolah penggerak dan 901 sekolah menengah kejuruan pusat keunggulan (SMK PK). Selanjutnya implementasi kurikulum merdeka diperluas implementasinya melalui Pendaftaran Implementasi Kurikulum Merdeka secara mandiri bagi sekolah yang tidak terdaftar sebagai sekolah penggerak (Dariyono, 2023).

Langkah-langkah tersebut menunjukkan upaya pemerintah dalam memastikan kelancaran proses pendidikan di tengah tantangan yang dihadapi, seperti pandemi Covid-19. Menurut (Fitra, 2023) “Kurikulum Merdeka menjadi salah satu instrumen yang diadopsi untuk mengatasi tantangan tersebut, dengan memberikan yang memberikan lebih banyak otonomi kepada sekolah, guru, dan siswa dalam merancang, mengelola, dan mengevaluasi proses pembelajaran”. Dengan demikian, perubahan kurikulum menjadi salah satu strategi adaptasi yang diterapkan untuk memastikan kontinuitas dan kualitas pendidikan di Indonesia.

Kemendikbudristek menjelaskan bahwa Kurikulum Merdeka diharapkan menjadi solusi dalam meningkatkan mutu pendidikan dengan menitikberatkan pada

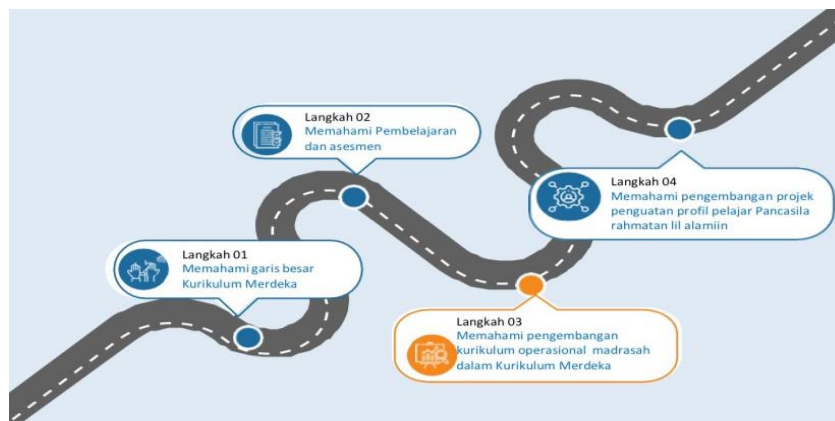
pendekatan pembelajaran yang lebih kontekstual, kreatif, dan adaptif. Kebijakan ini mencoba menggeser paradigma pendidikan yang lebih berorientasi pada standar tes akademik ke arah pembelajaran yang lebih menekankan pada pemahaman konsep, keterampilan berpikir kritis, serta pengembangan karakter peserta didik. Kurikulum merdeka adalah kurikulum yang dikembangkan sebagai kerangka kurikulum yang lebih fleksibel, sekaligus fokus pada materi esensial dan pengembangan karakter dan kompetensi peserta didik. Karakteristik utama dari kurikulum merdeka ini adalah (1) pembelajaran berbasis proyek untuk pengembangan *soft skill* dan karakter sesuai profil pelajar pancasila (2) fokus pada materi esensial sehingga ada waktu cukup untuk pembelajaran yang mendalam bagi kompetensi dasar seperti literasi dan numerasi (3) fleksibilitas untuk guru melakukan pembelajaran yang berdiferensiasi sesuai dengan kemampuan peserta didik dan melakukan penyesuaian dengan konteks muatan lokal (Idhartono, 2023).

Implementasi Kurikulum Merdeka diterapkan sebagai langkah untuk menghadapi krisis pembelajaran yang telah lama berlangsung. Selain itu, hasil tes baik di tingkat global maupun nasional menunjukkan bahwa pendidikan di Indonesia belum mencapai hasil yang memuaskan. Misalnya, hasil tes *Programme for International Student Assessment* (PISA) menunjukkan bahwa kemampuan siswa Indonesia dalam literasi, matematika, dan sains masih jauh di bawah rata-rata global. Hal ini menandakan adanya tantangan yang signifikan dalam mencapai standar pendidikan yang memadai. Hasil tes nasional juga menunjukkan gambaran yang kurang memuaskan. Penilaian Asesmen Kompetensi Siswa Indonesia (AKSI) dan survei lainnya menyoroti rendahnya kompetensi dasar siswa serta ketimpangan yang tinggi antara wilayah dan jenis sekolah. Bahkan, data menunjukkan bahwa hasil belajar tidak mengalami peningkatan yang signifikan dalam kurun waktu 15-20 tahun terakhir (Kemendikbudristek, 2021). Oleh karena itu evaluasi terhadap Kurikulum 2013 juga menjadi salah satu faktor yang dipertimbangkan pemerintah dalam mengadopsi Kurikulum Merdeka sebagai solusi untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia. Langkah-langkah adaptasi seperti ini menjadi penting untuk mengatasi tantangan yang

dihadapi oleh sistem pendidikan dan meningkatkan mutu pembelajaran di masa depan.

Implementasi Kurikulum Merdeka (IKM) pada madrasah secara utuh mengikuti kebijakan dari Kemendikbudristek. Namun, Kementerian Agama (Kemenag) melakukan adaptasi sesuai dengan kebutuhan pembelajaran di madrasah, dengan fokus pada penguatan Pendidikan Agama Islam dan Bahasa Arab, yang merupakan ciri khas dari madrasah tersebut dan dikeluarkannya KMA Nomor 347 Tahun 2022 tentang Pedoman Implementasi Kurikulum Merdeka pada Madrasah.

Gambar 1.1 Peta Konten dalam Pengimplementasian Kurikulum Merdeka pada Madrasah



(Sumber: Panduan IKM pada Madrasah, 2022)

Gambar 1.1 menjelaskan bagaimana langkah-langkah awal madrasah dalam memahami pengimplementasian Kurikulum merdeka pada madrasah. Perlu diketahui sebanyak 2.471 telah ditetapkan sebagai lembaga madrasah menerapkan Kurikulum Merdeka. Namun, pada tahun 2023, jumlah lembaga madrasah yang menerapkan Kurikulum Merdeka meningkat menjadi 26.169, meliputi jenjang RA, MI, MTs, dan MA/MAK (Direktur KSKK Madrasah, 2023). Data ini mencerminkan tingginya antusiasme dari warga madrasah dalam menerapkan Kurikulum Merdeka, yang juga menandakan bahwa madrasah memiliki keberanian untuk berubah. Kebijakan Kemendikbudristek diikuti secara penuh oleh madrasah dengan melakukan adaptasi menunjukkan kesadaran akan pentingnya mempertahankan karakteristik khas madrasah dalam pembelajaran. Ini

menegaskan bahwa penerapan Kurikulum Merdeka tidak hanya berfokus pada aspek sekular, tetapi juga memperhatikan kebutuhan agama dan budaya setiap lembaga pendidikan.

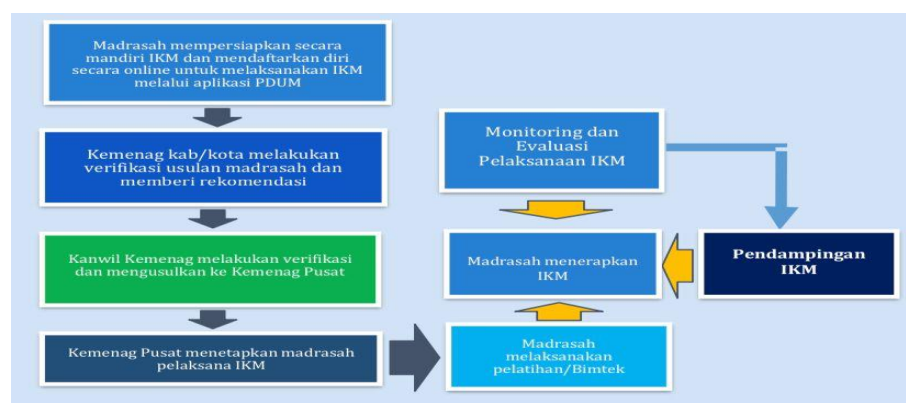
Madrasah Tsanawiyah (MTs) Negeri 1 Lampung Barat sebagai salah satu lembaga pendidikan formal yang berada di bawah naungan Kementerian Agama memiliki peran penting dalam implementasi Kurikulum Merdeka. Sebagai madrasah yang mengintegrasikan nilai-nilai keagamaan dengan pendidikan umum, MTs N 1 Lampung Barat menghadapi tantangan tersendiri dalam menerapkan kurikulum ini. Berada di daerah dengan latar belakang demografis dan sosiokultural yang beragam, MTs N 1 Lampung Barat perlu menyesuaikan pendekatan dan strategi pembelajarannya agar sesuai dengan kebutuhan dan potensi siswa. Sebagai satuan pendidikan yang diminati mayoritas penduduk di Lampung Barat, dengan potensi wilayah / letak yang strategis dan memiliki input peserta didik berasal dari keluarga yang peduli terhadap kepentingan pendidikan, kultur masyarakat Lampung Barat yang berfalsafah *Piil Pesanggiri* (hidup rukun, bergotong royong, penghargaan, persamaan dan kerja sama), kemudian merupakan salah satu madrasah yang terletak di jantung Kota dengan lingkungan yang asri dan rindang dan memiliki akses yang mudah ini dipercaya untuk melaksanakan Kurikulum merdeka pada tahun 2022 (KOM MTs N 1 Lampung Barat, 2023).

Kurikulum Merdeka Madrasah menerapkan pembelajaran sesuai dengan kemampuan peserta didik yang memberi ruang lebih untuk mengembangkan karakter dan kompetensi dasar. Pada kurikulum merdeka memiliki kemampuan karakter yang mendukung pembelajaran yang lebih interaktif dengan mengembangkan kemampuan (*soft skills*) dan memiliki karakter berupa akhlaq yang mulia, kerja sama, kebhinakaan, kemandirian, nalar kritis dan kreativitas. Kurikulum merdeka memiliki fokus pada esensial pembelajaran serta pembelajaran yang menyesuaikan dengan kemampuan peserta didik (Anas dkk, 2023). Oleh karena itu guru menjadi garda terdepan dalam implementasi kurikulum merdeka dan harus selalu meningkatkan kemampuan diri untuk memperluas wawasan dan kompetensi diri demi memberikan ilmu terbaik.

Permasalahan yang muncul adalah banyaknya tantangan yang ditemukan dalam implementasi kurikulum merdeka. Sehingga dalam proses penerapannya tidak semudah yang dibayangkan. Tantangan yang utama adalah kesiapan sumberdaya manusia (guru) sebagai pilar utama pelaksanaan sebuah kebijakan kurikulum merdeka secara kompetensi dan kemampuan berteknologi (Muqorobin, 2023). Sumber daya manusia menjadi peran penting dalam pelaksanaan kebijakan, oleh karena itu perlunya peningkatan kualitas sumberdaya tersebut melalui pelatihan-pelatihan untuk mewujudkan tujuan kebijakan, dalam hal ini adalah guru.

Implementasi kebijakan kurikulum merdeka pada madrasah keberhasilannya tergantung pada kesiapan sumber daya manusia dalam pelaksanaannya. Faktor penting yang mempengaruhi implementasi sebuah kebijakan yang dikatakan Edward III (1980) adalah *communication, resources, dispositions or attitudes and bureaucratic structure* (Kadji, 2015). IKM pada Madrasah telah dilaksanakan secara bertahap mulai tahun 2022/2023. Madrasah dalam pelaksanaannya dapat memilih dua pilihan yaitu pertama, madrasah masih menggunakan kurikulum 2013 dengan prinsip Kurikulum Merdeka. Kedua, madrasah melaksanakan IKM secara penuh (Panduan IKM pada Madrasah). Berikut mekanisme implementasi Kurikulum Merdeka:

Gambar 1.2 Skema Mekanisme Implementasi Kurikulum Merdeka pada Madrasah.



(Sumber: Panduan IKM, 2022)

Gambar 1.2, menunjukan tahap-tahap yang harus dilakukan oleh madrasah dalam pengimplemmtasian Kurikulum Merdeka. Hal ini tentu menjadi perhatian utama

untuk keberhasilan pelaksanaan kurikulum di Madrasah. Pada gambar tersebut juga menunjukkan proses pelaksanaan IKM yaitu Madrasah melaksanakan pelatihan/ bimtek, pendampingan IKM, monitoring dan evaluasi pelaksanaan IKM oleh pihak-pihak terkait. Diantaranya dapat dijelaskan dalam tabel 1.1 sebagai berikut:

Tabel 1.1 Kegiatan yang dapat dilakukan Madrasah dalam Implementasi Kurikulum Merdeka.

No.	Kegiatan	Pihak
1.	Mengikuti Sosialisasi Implementasi Kurikulum Merdeka	Kementrian Agama, Kanwil Kementerian Agama , Kementerian Agama Kabupaten, KKM, MGMP, Pendidik.
2.	Mengikuti Bimbingan Teknis, Pelatihan Kurikulum Merdeka	Kepala Madrasah, Wakil Kepala Madrasah dan guru Madrasah.
3.	Menyusun dan menetapkan Tim Pengembang Kurikulum Madrasah	Kepala Madrasah, Wakil Kepala Madrasah dan guru Madrasah, tenaga pendidik, Komite.
4.	Menyusun perencanaan Implementasi Kurikulum Merdeka.	Kepala Madrasah, Wakil Kepala Madrasah dan guru Madrasah, tenaga pendidik, Komite.
5.	Pelaksanaan Implementasi Kurikulum Merdeka.	Kepala Madrasah, Wakil Kepala Madrasah dan guru Madrasah, tenaga pendidik,
6.	Pendampingan	Kementrian Agama, Kanwil Kementerian Agama , Kementerian Agama Kabupaten, Pengawas Madrasah
7.	Monitoring dan evaluasi	Kementrian Agama, Kanwil Kementerian Agama , Kementerian Agama Kabupaten, Madrasah pelaksana Kurikulum Merdeka

(sumber: Panduan IKM, 2022)

MTs N 1 Lampung Barat adalah Madrasah Tsanawiyah pertama di Kabupaten Lampung Barat yang dipilih oleh Kementerian Agama dalam mengimplementasikan Kurikulum Merdeka. Hal ini tentunya akan menghadapi sejumlah tantangan yang perlu diatasi untuk mencapai kesuksesan Kurikulum Merdeka. Menurut Hahekaya dan Pollatu (2022) dalam penelitiannya salah satu tantangan yang sekolah dalam mengimplementasikan kurikulum merdeka adalah sumber daya, baik itu dari segi kesiapan tenaga pengajar, pemahaman konsep dan sarana prasarana. Berikut adalah data tenaga pendidik sebanyak 41 orang dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 1.2 Jumlah Guru MTs N 1 Lampung Barat.

Jenis <u>Kepegawaian</u>	<u>Jeni Kelamin</u>		<u>Kualifikasi Pendidikan</u>		<u>Tersertifikasi</u>	
	L	P	S1	S2	<u>Sudah</u>	Belum
PNS	9	20	25	4	24	5
PPPK	1	4	5	-	-	5
GTT	3	3	6	-	-	6
<u>Jumlah</u>	13	27	36	4	24	16
<u>Persentase</u>	13%	67%	90%	10%	60%	40%

(Sumber: KOM MTs 1 Lampung Barat, 2023)

Berdasarkan tabel 1.2 sebagian besar tenaga pendidik (90%) memiliki kualifikasi pendidikan minimal Sarjana (S1), dan sekitar 10% telah melanjutkan ke jenjang Magister (S2). Selanjutnya sebagian besar PNS (Pegawai Negeri Sipil) sudah memiliki sertifikasi pendidik, yaitu sebanyak 24 orang dari 29 PNS. Namun, untuk PPPK (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja) dan GTT (Guru Tidak Tetap), belum ada yang tersertifikasi. Hal ini menunjukkan perlunya perhatian khusus untuk meningkatkan sertifikasi bagi tenaga pendidik non-PNS agar kualitas pembelajaran tetap terjaga. Pada dasarnya pengelolaan sumber daya manusia merupakan aspek yang sangat penting dalam proses pendidikan secara umum. Oleh karena itu, fungsi-fungsi dalam pengelolaan sumber daya manusia harus dilaksanakan secara optimal sehingga kebutuhan yang menyangkut tujuan individu, organisasi/lembaga, organisasi ataupun kelembagaan dapat tercapai (Putra & Mei, 2021).

Kementerian agama menyediakan struktur materi, bimtek atau pelatihan untuk pengembangan sumber daya manusia melalui *platform* MOOC Pintar Kemenag dan sikurma.kemenag.go.id mengenai kurikulum merdeka yang dapat diakses secara terbuka, mandiri dan online yang dilakukan kapan saja dan darimana saja. Beberapa contoh materi pelatihan atau bimtek yang disediakan kemenag mengenai implementasi kurikulum merdeka yaitu kebijakan kurikulum merdeka, pedoman IKM, pemebelajaran paradigma baru dan materi-materi lainnya mengenai implementasi kurikulum merdeka. Berikut jumlah tenaga pendidik yang telah mengikuti pelatihan-pelatihan atau bimtek yang disediakan oleh Kementerian agama:

Tabel 1.3 Daftar Pelatihan – Pelatihan mengenai Kurikulum Merdeka

No	Nama Pelatihan	Pelaksanaan	
		Ya	Tidak
1	Pelatihan Kebijakan Kurikulum Merdeka	30	10
2	Pelatihan Pedoman IKM	35	5
3	Pelatihan Pembelajaran Paradigma Baru	30	10
4	Pelatihan Kurikulum Operasional Madrasah (KOM)	29	11
5	Pelatihan Pembelajaran dan Asesmen/Penilaian	30	10
6	Pelatihan Capaian Pembelajaran (CP), Tujuan Pembelajaran (TP) dan Alur Tujuan Pembelajaran (ATP)	34	6
7	Pelatihan Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila dan Profil Pelajar Rahmatan Lil Alamin (P5 PPRA)	32	8
8	Pelatihan Penyusunan Modul Ajar/RPP	33	7
9	Pelatihan Pembelajaran Berdiferensiasi	30	10
10	Pelatihan Asesmen Awal/Diagnostik	28	12

(Sumber: Observasi Peneliti, 2024)

Dari tabel 1.3 menunjukkan bahwa masih ada guru yang belum mengikuti pelatihan mengenai kurikulum merdeka, salah satu contohnya yaitu pelatihan kebijakan kurikulum merdeka yang hanya diikuti 30 orang dari 40 tenaga pendidikan yang ada di MTs N 1 Lampung Barat. Padahal pelatihan pemahaman mengenai kurikulum merdeka dapat dilakukan secara daring, luring ataupun *hibryd* yang disediakan oleh Kementerian Agama yang dapat diakses secara terbuka oleh semua madrasah dan pihak lainnya. Pelatihan perlu dilakukan oleh guru karena peran guru dalam penyusunan dan pelaksanaan kurikulum merdeka sangat penting dalam mencapai tujuan kebijakan tersebut. Guru berperan sebagai agen perubahan yang secara aktif terlibat dalam merancang dan mengimplementasikan kurikulum yang responsif terhadap kebutuhan siswa (Tuerah & Tuerah, 2023). Oleh karena itu, hal ini membutuhkan pelatihan yang intensif dan dukungan yang berkelanjutan dari pihak kepala sekolah dan lembaga terkait.

Perubahan budaya dan sikap juga menjadi hal yang perlu diperhatikan dalam implementasi Kurikulum Merdeka di MTs N 1 Lampung Barat. Implementasi

kurikulum merdeka memerlukan pendekatan yang berbeda dari paradigma pembelajaran tradisional, dan hal ini dapat menimbulkan resistensi dari beberapa pihak terkait (Suhandi & Robi'ah, 2022). Selain itu, dari wawancara awal yang didapat oleh peneliti, MTs N 1 Lampung Barat belum pernah mendapatkan pendampingan dan evaluasi dari pihak terkait. Jika kita melihat didalam Panduan IKM pada Madrasah (2022) menyebutkan bahwa pendampingan merupakan proses pembimbingan dan fasilitasi oleh pihak tertentu sesuai tugas dan fungsinya secara sistematis dan berkelanjutan kepada satuan pendidikan dalam mengimplementasikan kurikulum merdeka. Oleh karena itu, perlu adanya upaya yang terus-menerus untuk membangun kesadaran, pemahaman, dan dukungan dari semua pihak terkait tentang urgensi dan manfaat dari Kurikulum Merdeka dalam meningkatkan mutu pendidikan di MTs N 1 Lampung Barat.

Berdasarkan permasalahan yang telah dijabarkan di atas, peneliti tertarik untuk membahas secara mendalam tentang **“Implementasi Kebijakan Kurikulum Merdeka Pada Madrasah Tsanawiyah Negeri 1 Lampung Barat”**. Dengan demikian, penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran komprehensif mengenai proses implementasi Kurikulum Merdeka di MTsN 1 Lampung Barat dan menyusun rekomendasi untuk meningkatkan mutu pendidikan di madrasah tersebut.

1.2 Rumusan Masalah

Rumusan masalah terkait dengan implementasi Kurikulum Merdeka di Madrasah Tsanawiyah Negeri 1 Lampung Barat dapat dibuat sebagai berikut:

1. Bagaimana proses Implementasi Kurikulum Merdeka di Madrasah Tsanawiyah Negeri 1 Lampung Barat?
2. Bagaimana tantangan yang dihadapi dalam Implementasi Kurikulum Merdeka di Madrasah Tsanawiyah Negeri 1 Lampung Barat?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang ada, maka tujuan penelitian ini yaitu :

1. Mendeskripsikan dan menganalisis proses Implementasi Kurikulum Merdeka di Madrasah Tsanawiyah Negeri 1 Lampung Barat.

2. Mendeskripsikan dan menganalisis tantangan yang dihadapi implementasi Kurikulum Merdeka di Madrasah Tsanawiyah Negeri 1 Lampung Barat.

1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian yang telah ditentukan maka Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dan memberikan kontribusi dari beberapa pihak yang berkepentingan.

1.4.1 Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi pemikiran, informasi dan pengetahuan bagi Studi Administrasi Publik khususnya yang berkaitan dengan implementasi kebijakan publik. Memberikan kontribusi terhadap literatur akademik mengenai implementasi Kurikulum Merdeka di madrasah, khususnya di tingkat Madrasah Tsanawiyah. Memperluas pemahaman mengenai tantangan dan faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan implementasi Kurikulum Merdeka pada Madrasah.

1.4.2 Manfaat Praktis:

- a. Memberikan rekomendasi yang dapat diimplementasikan oleh MTs N 1 Lampung Barat untuk mengatasi kendala dan meningkatkan efektivitas penerapan Kurikulum Merdeka.
- b. Membantu guru dan tenaga pendidik di MTs N 1 Lampung Barat dalam memahami dan menerapkan strategi pembelajaran yang lebih sesuai dengan prinsip-prinsip Kurikulum Merdeka.
- c. Memberikan panduan bagi pengelola madrasah dan pembuat kebijakan pendidikan dalam merancang program pelatihan dan dukungan yang lebih efektif bagi guru.

II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu merupakan salah satu upaya yang dilakukan peneliti untuk mencari perbandingan dan untuk menemukan inspirasi baru untuk penelitian selanjutnya di samping itu penelitian terdahulu membantu peneliti dalam memposisikan penelitian serta menunjukkan orsinalitas dari penelitian. Dengan melakukan langkah ini, maka akan dapat dilihat sejauh mana orisinalitas dan posisi penelitian yang hendak dilakukan. Berikut hasil-hasil penelitian terdahulu yang dijadikan perbandingan sekaligus pedoman yang disajikan pada Tabel 2.1.

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

No	Penulis, Tahun	Judul Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
1	Sultoni (2024))	Implementasi Kebijakan Kurikulum Merdeka di SMP Amaliah Bogor dan SMPN 1 Dramaga	Penelitian deskriptif kualitatif	Penelitian ini mengevaluasi penerapan Kurikulum Merdeka di dua sekolah menengah pertama di Bogor, yaitu SMPN 1 Dramaga dan SMP Amaliah. Fokus utama evaluasi dilakukan berdasarkan teori implementasi George Edward III, yang menyoroti aspek-aspek berikut: Komunikasi, sumberdaya, disposisi, dan Birokrasi. Penelitian mengungkapkan bahwa keberhasilan implementasi sangat dipengaruhi oleh kemampuan komunikasi yang efektif, dukungan sumber daya memadai, serta positifnya disposisi pelaksana. Kendala birokrasi dan keterbatasan sumber daya dapat menjadi hambatan signifikan.
2	Sutri Ramah & Miftahur	Analisis Kebijakan Implementasi	penelitian pustaka (<i>library research</i>) dengan	kebijakan implementasi Kurikulum Merdeka pada madrasah dilakukan saat

No	Penulis, Tahun	Judul Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
	Rohman (2023)	Kurikulum Merdeka di Madrasah.	mempelajari data literatur dari sejumlah dokumen kebijakan perundangundangan, buku, artikel jurnal, berita, serta dokumen pendukung lainnya.	kurikulum 2013 perspektif KMA No. 183 Tahun 2019 baru diterapkan, sehingga madrasah harus mempersiapkan diri menyambut kebijakan baru tersebut. Jika dianalisis, kebijakan implementasi kurikulum merdeka yang bertujuan untuk pemulihan pembelajaran ini dapat berjalan dengan baik apabila pimpinan madrasah dan tenaga pendidik benar-benar telah siap dalam memahami kurikulum tersebut, baik dari segi pembelajaran intrakurikuler, maupun pembelajaran kokurikuler. Di madrasah sendiri kegiatan kokurikuler berupa proyek P5 PPRA yang sejalan dengan internalisasi nilai-nilai moderasi beragama yang menjadi program prioritas Kementerian Agama dalam RPJM 2020-2024.
3	Agus Salim Chamidi, (2022)	Penguatan Implementasi Kurikulum Merdeka di Sekolah/Madrasah melalui Bimtek Model In-On-In.	Penelitian deskriptif kualitatif.	(1)bimtek mampu menguak sejumlah kebuntuan dalam IKM, sehingga kegagalan dan kekhawatiran yang timbul mampu berubah menjadi peningkatan pemahaman dan penguasaan IKM, KOSP, dan MA, (2)bimtek bahkan mampu menyuguhkan sebetulnya solusi perbaikan mutu pendidikan terkait penyusunan KOSP dan MA, (3)bimtek menunjukkan terjadi peningkatan pemahaman dan penguasaan IKM, KOSP, dan MA yang signifikan, dan (4)penyelenggaraan bimtek IKM ternyata mempunyai pengaruh positif pada kinerja para pihak yang berkolaborasi. Rekomendasinya, model in-on-in dengan mengkolaborasikan sejumlah sekolah/madrasah,

No	Penulis, Tahun	Judul Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
				perguruan tinggi (PT), dan lembaga lain layak terus dilakukan untuk peningkatan pemahaman dan penguasaan IKM, sekaligus untuk peningkatan kinerja para pihak.
4	Rusman Langke (2021)	Implementasi Merdeka Belajar di Madrasah	Penelitian kepustakaan (library research).	Hasil penelitian menemukan bahwa: (1) Tenaga pendidik belum sepenuhnya memahami konsep merdeka belajar, bahkan cenderung salah paham (2). Tujuan merdeka belajar tidak sekedar mengganti Ujian Akhir Sekolah Berstandar nasional (UASBN) dan Ujian Nasional (UN) atau Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) dan Zonasi, namun dalam perspektif ke depan adalah untuk meningkatkan kualitas pendidikan nasional dan penyiapan SDM memasuki era Global, (3) Peningkatan kompetensi tenaga pendidik dan kependidikan merupakan kunci utama keberhasilan dari implementasi merdeka belajar.

(Sumber: diolah peneliti 2024)

2.2 Kebijakan Publik

Kebijakan publik terdiri dari dua kata yang memiliki arti masing-masing. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, arti kebijakan yaitu rangkaian konsep dan asas yang menjadi garis besar dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan, dan cara bertindak. Sedangkan, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia untuk arti dari publik itu sendiri ialah orang yang banyak (umum), semua orang yang datang (menonton, mengunjungi, dan sebagainya). Ketika istilah kebijakan dan publik digabung menjadi satu, yaitu kebijakan publik, memiliki makna yang lebih luas dari pada ketika diartikan secara sendiri-sendiri.

Kebijakan publik merupakan salah satu komponen negara yang tidak boleh diabaikan. Dengan demikian kebijakan publik adalah suatu rencana atau prinsip yang dibuat dan dijalankan oleh pemerintah atau negara untuk mengatur dan mengelola kepentingan masyarakat secara umum.

Menurut Alaslan (2021) kebijakan publik, termasuk di dalamnya adalah tata Kelola negara (*governance*), mengatur interaksi antara negara dengan rakyatnya. Negara merupakan pemegang kekuasaan yang sah, tetapi tidak akan efektif tanpa ada kebijakan publik yang dibuat. Negara merupakan pemegang kekuasaan yang sah dan karena kebijakan publik pada dasarnya merupakan kebijakan negara, maka kebijakan publik dimaknai sebagai sebuah tindakan yang dilakukan oleh pemegang kekuasaan, untuk memastikan bahwa tujuan yang sudah dirumuskan dan disepakati oleh publik dapat tercapai.

Menurut Thomas R. Dye (2005) yang dimaksud dengan kebijakan *public* yaitu sebagai berikut: *Public policy is whatever governments choose to do or not to do?* (Kebijakan publik adalah apa saja yang dipilih oleh pemerintah untuk dilakukan atau untuk tidak dilakukan). Sedangkan menurut James E. Anderson (2006): *Public policies are those policies developed by governmental bodies and officials?* (Kebijakan publik adalah kebijakan-kebijakan yang dikembangkan oleh badan badan dan pejabat-pejabat pemerintah) (Tahir, 2015). Dengan kata lain, kebijakan publik bukan hanya sekadar aturan atau keputusan, melainkan merupakan instrumen strategis yang menghubungkan kekuasaan negara dengan aspirasi masyarakat. Melalui kebijakan publik, pemerintah dapat menjalankan fungsi dan tanggung jawabnya secara efektif, sehingga tercipta keseimbangan antara kepentingan negara dan kebutuhan rakyat.

Sedangkan menurut Mustari (2015) kebijakan publik yaitu merupakan upaya memahami dan mengartikan apa yang dilakukan atau tidak dilakukan oleh pemerintah mengenai satu masalah, apa penyebabnya dan apa pengaruhnya. Sedangkan menurut Anderson: Serangkaian tindakan yang mempunyai tujuan tertentu yang diikuti dan dilaksanakan oleh pelaku atau sekelompok pelaku guna memecahkan masalah. Dan menurut Irfan Islamy (2000) bahwa kebijakan publik adalah serangkaian tindakan yang ditetapkan dan dilaksanakan atau tidak

dilaksanakan oleh pemerintah yang mempunyai tujuan atau berorientasi pada tujuan tertentu demi kepentingan seluruh masyarakat. Berdasarkan pengertian dapat diartikan kebijakan publik merupakan fondasi utama dalam tata kelola pemerintahan yang efektif dan pembangunan nasional yang berkelanjutan. Melalui kebijakan publik, pemerintah dapat mengelola berbagai tantangan sosial, ekonomi, dan politik dengan cara yang terstruktur dan berorientasi pada kepentingan masyarakat luas. Pemahaman yang mendalam terhadap definisi dan fungsi kebijakan publik dari berbagai perspektif akademis memberikan landasan yang kuat bagi para pembuat kebijakan untuk merancang dan melaksanakan kebijakan yang tepat sasaran dan berdampak positif. Dengan demikian, kebijakan publik bukan hanya sekadar instrumen administratif, melainkan juga merupakan manifestasi nyata dari tanggung jawab negara dalam mewujudkan kesejahteraan dan kemajuan bangsa secara menyeluruh dan berkelanjutan

2.3 Implementasi Kebijakan Publik

Implementasi kebijakan publik sebagai salah satu aktivitas dalam proses kebijakan publik, sering bertentangan dengan yang diharapkan, bahkan menjadikan produk kebijakan itu sebagai menjadi batu sandungan bagi pembuat kebijakan itu sendiri. Itulah sebabnya implementasi kebijakan publik, diperlukan pemahaman yang mendalam tentang studi kebijakan publik (Tahir, 2015).

Menurut Dunn (1981) implementasi kebijakan dianggap sebagai suatu proses tindakan administrasi dan politik (*a proces of moving to ward a policy objective by mean admnistrative and political steps*). Menurut Islamy (2000) pelaksanaan atau implementasi kebijakan bersangkut paut dengan ikhtiar-ikhtiar untuk mencapai tujuan dari ditetapkannya suatu kebijakan tertentu. Sebagaimana telah diuraikan, jadi implementasi suatu kebijakan merupakan suatu proses untuk mewujudkan tujuan-tujuan yang telah dipilih dan ditetapkan untuk menjadi kenyataan. Dengan demikian implementasi kebijakan publik adalah proses penting yang melibatkan langkah-langkah administratif dan politik untuk mewujudkan tujuan kebijakan yang telah ditetapkan. Namun, dalam praktiknya, pelaksanaan kebijakan sering kali menghadapi berbagai kendala yang membuat

hasilnya tidak sesuai dengan harapan, bahkan terkadang kebijakan yang sudah dibuat justru menjadi hambatan bagi pembuatnya sendiri. Oleh karena itu, pemahaman yang mendalam tentang studi kebijakan publik sangat diperlukan agar proses implementasi dapat berjalan efektif dan tujuan kebijakan dapat tercapai dengan baik.

2.3.1 Unsur – Unsur Implementasi Kebijakan

Menurut Saptispi (2023); Alaslan (2021); Abdoellah (2016) unsur-unsur dalam implementasi kebijakan yang mutlak harus ada yaitu (1) unsur pelaksana (*implementor*), (2) adanya program yang akan dilaksanakan, (3) *target groups* atau kelompok sasaran. Sedangkan unsur-unsur dari implementasi kebijakan yang mutlak harus ada yaitu (Tachjan, 2006):

1. Unsur pelaksana Unsur pelaksana adalah *implementor* kebijakan yang diterangkan Tachjan (2006) yaitu “pelaksana kebijakan merupakan pihak-pihak yang menjalankan kebijakan yang terdiri dari penentuan tujuan dan sasaran organisasional, analisis serta perumusan kebijakan dan strategi organisasi, pengambilan keputusan, perencanaan, penyusunan program, pengorganisasian, penggerakkan manusia, pelaksanaan operasional, pengawasan serta penilaian”.

2. Adanya program yang dilaksanakan

Suatu kebijakan publik tidak mempunyai arti penting tanpa tindakan-tindakan riil yang dilakukan dengan program, kegiatan atau proyek. Hal ini dikemukakan Tachjan (2006) bahwa “*Implementation is that set of activities directed toward putting out a program into effect*”. Selanjutnya, Grindle (1980) menjelaskan bahwa isi program harus menggambarkan; “kepentingan yang dipengaruhi (*interest affected*), jenis manfaat (*type of benefit*), derajat perubahan yang diinginkan (*extent of change envisioned*), status pembuat keputusan (*site of decision making*), pelaksana program (*program implementers*) serta sumberdaya yang tersedia (*resources committed*)”. Program dalam konteks implementasi kebijakan publik terdiri dari beberapa tahap yaitu:

- a) Merancang bangun (*design*) program beserta perincian tugas dan perumusan tujuan yang jelas, penentuan ukuran prestasi yang jelas serta biaya dan waktu.
 - b) Melaksanakan (*aplication*) program dengan mendayagunakan strukturstruktur dan personalia, dana serta sumber-sumber lainnya, prosedur dan metode yang tepat.
 - c) Membangun sistem penjadwalan, monitoring dan sarana-sarana pengawasan yang tepat guna serta evaluasi (hasil) pelaksanaan kebijakan (Tachjan, 2006).
3. *Target group* atau kelompok sasaran.

Tachjan (2006) mendefinisikan bahwa: target group yaitu sekelompok orang atau organisasi dalam masyarakat yang akan menerima barang atau jasa yang akan dipengaruhi perilakunya oleh kebijakan. Untuk dapat mengkaji dengan baik suatu implementasi kebijakan publik perlu diketahui variabel atau faktor-faktor penentunya. Untuk menggambarkan secara jelas variabel atau faktor-faktor yang berpengaruh penting terhadap implementasi kebijakan publik serta guna penyederhanaan pemahaman, maka akan digunakan model-model implementasi kebijakan (Tahir, 2015).

2.4 Model-Model Implementasi Kebijakan Publik

Implementasi kebijakan publik akan lebih mudah dipahami apabila menggunakan suatu model atau kerangka pemikiran tertentu. Suatu model akan memberikan gambaran kepada peneliti secara bulat lengkap mengenai sesuatu objek, situasi, atau proses. Oleh karena itu di dalam uraian berikut ini tidak akan dibahas semua macam model, tetapi beberapa saja yang dianggap cukup penting untuk diperkenalkan yaitu:

1. Model Kebijakan Edward III

Model ini dikemukakan oleh George Charles Edwards III (1980), bahwa implementasi kebijakan publik merupakan sesuatu yang krusial karena ketika terjadi kegagalan sekalipun kebijakan itu dapat di implementasikan dengan sangat baik maka kebijakan itu tidak tepat sasaran ataupun

sebaliknya. Dalam mengkaji permasalahan tersebut, Edwards mengajukan beberapa pertanyaan sebagai prasyarat yang diperlukan untuk menguji keberhasilan kebijakan tersebut seperti “*In our approach to the study of policy implementation, we begin in the abstract and ask: What are the preconditions for successful policy implementation? What are the primary obstacles to successful policy implementation?*”. Sebagai jawaban atas pertanyaan penting itu, maka Edwards III (1980) menawarkan dan mempertimbangkan empat faktor yang dapat bekerja secara simultan dan berinteraksi satu sama lain dalam mengimplementasikan kebijakan publik yaitu *Communication, resources, dispositions or attitudes, and bureaucratic structure* (Tahir, 2015).

Perlu dipahami bahwa implementasi kebijakan itu merupakan suatu proses yang dinamis dan mempunyai keterkaitan antara variabel yang satu dengan yang lainnya sehingga perlu dijelaskan secara lebih mendalam tentang model ini terutama tentang beberapa faktor yang dapat menentukan sukses tidaknya implementasi kebijakan tersebut antara lain :

a) Komunikasi

Komunikasi merupakan sarana yang paling efektif dan cermat untuk melaksanakan kebijakan yang telah diputuskan oleh para pelaksana (*implementor*). Jika pesan yang disampaikan tidak jelas dan tidak dipahami dengan baik (*disorientasi information*) maka kemungkinan kebijakan tersebut tidak dapat dilaksanakan dengan baik sehingga tindakan yang dilakukan hanya berdasarkan otoritasnya semata. Dalam tataran inilah, maka faktor komunikasi memegang peranan penting agar *implementor* kebijakan dapat mengetahui dengan pasti apa yang akan mereka kerjakan. Secara umum Edwards mengatakan, ada tiga hal penting yang perlu diperhatikan dalam melakukan komunikasi kebijakan yaitu faktor transmisi, konsistensi dan kejelasan (Winarno, 2014).

Apabila kebijakan ingin diimplementasikan sesuai tujuan yang ada, maka petunjuk pelaksanaan tidak hanya harus dipahami, melainkan juga petunjuk itu harus jelas. Jika petunjuk pelaksanaan itu tidak

jas, maka para pelaksana akan mengalami kebingungan tentang apa yang harus mereka lakukan. Ketidakjelasan dalam berkomunikasi, mungkin juga disebabkan karena mereka mempunyai keleluasaan untuk memaksakan pandangan mereka sendiri pada implementasi kebijakan, pandangan yang mungkin berbeda dengan pandangan atasan mereka atau pandangan yang seharusnya dijadikan acuan. Terdapat tiga indikator yang dapat dipakai dalam mengukur variabel komunikasi tersebut yaitu: transmisi, konsistensi dan kejelasan.

b) Sumber Daya

Sumberdaya juga merupakan faktor yang penting dalam implementasi kebijakan publik. Dengan sumber daya yang memadai akan memungkinkan terlaksananya kebijakan tersebut secara efektif. Sumber-sumber pendukung tersebut meliputi yaitu staf dengan jumlah dan ketrampilan yang memadai, informasi yang mendukung disertai dengan petunjuk pelaksanaan yang jelas, adanya kewenangan yang diberikan dengan tanggung jawab dipercayakan serta adanya penyediaan fasilitas yang dapat mendukung terimplementasikan kebijakan tersebut secara efektif. Proses implementasi kebijakan dalam model *direct and indirect impact of implementation* yang kedua adalah *resources* (sumber daya).

c) Sikap Pelaksana

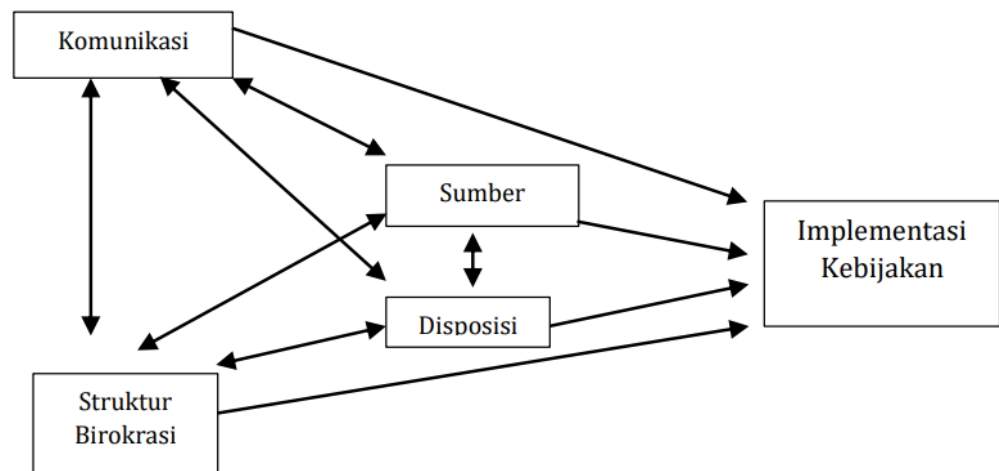
Sikap pelaksana merupakan bentuk kecenderungan yang mempunyai konsekuensi penting dalam implementasi kebijakan. Sikap yang ditunjukkan oleh *implementor* terhadap kebijakan yang dibuat tersebut merupakan bentuk dukungan dan sebaliknya dapat juga mempersulit dan menghambat jalannya kebijakan tersebut. Adapun beberapa hal yang harus diperhatikan terkait dengan sikap pelaksana kebijakan yaitu : pertama, dampak yang ditimbulkan dengan adanya zona ketidakacuhan dalam melaksanakan maupun tidak melaksanakan kebijakan. Kedua, adanya kecenderungan

untuk mengangkat dan menempatkan *personel implementor* berdasarkan pertimbangan politik semata tanpa melihat kapasitas dan kapabilitas yang dimilikinya. Ketiga, adanya kecenderungan untuk melaksanakan kebijakan tersebut berdasarkan pada motivasi *self-interest* untuk mendapatkan insentif tanpa melihat substansi dan tujuan kebijakan tersebut.

d) Struktur Birokrasi

Struktur birokrasi juga merupakan salah satu badan yang paling sering terlibat dalam melaksanakan kebijakan. Aspek dari struktur birokrasi adalah *Standard Operating Procedure* (SOP) dan fragmentasi. SOP adalah prosedur atau tata cara standar yang digunakan oleh unit-unit birokrasi dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya. Edward III menekankan bahwa SOP yang fleksibel dan dapat disesuaikan dengan kondisi yang berubah akan sangat mendukung keberhasilan implementasi kebijakan. Sebaliknya, SOP yang kaku dan tidak adaptif dapat menghambat proses pelaksanaan kebijakan. Sedangkan fragmentasi menurut adalah kondisi di mana tanggung jawab pelaksanaan suatu kebijakan tersebar di berbagai unit organisasi yang berbeda. Sehingga fragmentasi ini menyebabkan pembagian tugas yang terpisah-pisah, yang bisa menimbulkan tantangan koordinasi. Sistem birokrasi juga merupakan badan normatif yang secara kolektif bertujuan untuk memecahkan dan mengatasi permasalahan sosial dalam kehidupan masyarakat. Oleh sebab itu, mengetahui struktur birokrasi merupakan faktor yang paling fundamental dalam mengkaji implementasi kebijakan. Secara jelas model ini dapat digambarkan dengan skema sebagai berikut:

Gambar 2.1 Model Implementasi Kebijakan



Sumber : Edwards III 1980 (dalam Kadji, 2015)

2. Model Implementasi Merilee S. Grindle

Model ini diperkenalkan oleh Merilee S. Grindle (1980) dalam buku (Tahir, 2015) bahwa implementasi kebijakan itu akan berhasil untuk dilaksanakan apabila para *implementor* lebih fokus pada pencapaian tujuan akhir (*outcomes*) berdasarkan rancangan dan pembiayaan kebijakan yang telah ditetapkan. Dalam prosesnya, pelaksanaan kebijakan harus didesain sedemikian sehingga agenda aksi yang dilakukan selalu merujuk pada tujuan yang ingin dicapai meskipun selalu berhadapan dengan objek sasaran yang selalu dinamis. Ada dua faktor yang harus selalu menjadi fokus perhatian dalam menerapkan model kebijakan ini yaitu isi kebijakan (*content of Policy*) dan lingkungan implementasi (*Context of Implementation*), yang dapat dijelaskan rincianya sebagai berikut :

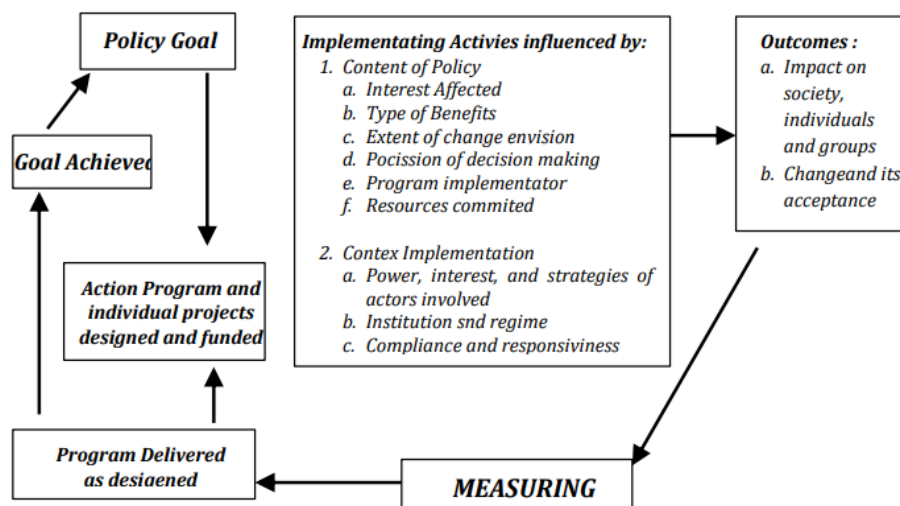
- a) Isi kebijakan (*content of policy*), ada beberapa indikator yang dapat digunakan untuk mengukurnya :
 - 1) Adanya kepentingan yang mempengaruhi (*interest affected*), dalam proses pelaksanaan kebijakan itu selalu melibatkan kepentingan banyak orang yang perlu untuk dipertahankan dan diketahui.

- 2) Manfaat yang akan diperoleh (*type of benefits*), sudah harus dipastikan bahwa setiap kebijakan dibuat dapat memberikan manfaat ganda (kolektif) meskipun tidak ada dampak negatif yang bias ditimbulkan.
 - 3) Tingkat Perubahan yang diharapkan (*extent of change envision*), suatu kebijakan haruslah mempunyai target dan tujuan untuk melakukan perubahan terhadap permasalahan yang dihadapi. Oleh karenanya maka sudah harus dipetakan secara jelas skala prioritasnya bukan hanya sekedar kebijakan yang bersifat pragmatis (memberikan bantuan).
 - 4) Posisi pengambilan keputusan (*position of decision making*), posisi dan letak geografis suatu organisasi itu juga akan sangat menentukan berhasil tidaknya kebijakan itu dapat diimplementasikan.
 - 5) Pelaksana program (*program implementor*), program yang baik itu juga sangat didukung dengan perencanaan yang matang dengan sumber daya yang memadai
 - 6) Ketersediaan dan distribusi sumber daya (*resources committed*), kualitas kapabilitas *implementor* yang memadai juga sangat berpengaruh terhadap keberhasilan pelaksanaan kebijakan.
- b) Lingkungan implementasi (*context of implementation*), faktor kedua ini dapat dijelaskan dengan beberapa indikator yaitu:
- 1) kekuasaan, kepentingan, strategi dari aktor yang terlibat (*power, interest, and strategy of actor involved*), beberapa indikator ini harus mendapatkan pertimbangan yang matang karena pasti dinamikanya sangat kompleks yang cenderung akan mempengaruhi tujuan kebijakan yang diharapkan
 - 2) karakteristik kelembagaan dan rezim yang berkuasa (*institution and regime characteristic*), keberhasilan kebijakan itu sangat juga dipengaruhi oleh lingkungannya sehingga diperlukan adanya keselarasan interaksi dan konsistensi dalam mewujudkan tujuan kebijakan.

- 3) Daya tanggap dan responsivitas (*compliance and responsiveness*), kepekaan *implementor* terhadap tuntutan lingkungan itu juga harus dapat direspon dengan baik untuk dapat memastikan adanya kesatuan pemahaman dalam melaksanakan tujuan kebijakan.

Setelah kedua faktor diatas dapat diketahui oleh *implementor* maka kebijakan itu dapat dilaksanakan sesuai dengan tujuan yang diharapkan karena pada dasarnya suatu program dengan *content* yang sama mungkin akan berbeda hasilnya apabila dilaksanakan dalam *context* yang berbeda (Subiyanto, 2020). Adapun ilustrasinya dapat dilihat pada gambar berikut dibawah ini:

Gambar 2.2 Model Implementasi Kebijakan



Sumber : Merilee S. Grindle 1980 dalam (Wibawa, 1990).

3. Model Implementasi Van Meter dan Van Horn

Model ini diperkenalkan oleh Donald Van Meter dan Carl Van Horn (1975), merupakan model paling mendasar dan sangat klasik. Model ini lebih menekankan bahwa implementasi kebijakan akan berjalan secara linear dari keputusan politik dengan membangun keselarasan hubungan (*linkage*) untuk menyatukan pandangan antara kebijakan publik, *implementor*, dan kinerja /prestasi kerja kebijakan publik (*permormance*).

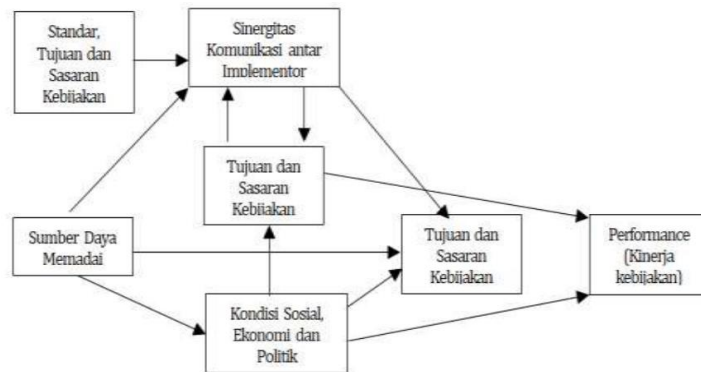
Secara implisit keputusan terhadap kebijakan yang dilaksanakan sangat tergantung dengan ukuran dasar dan tujuan kebijakan tersebut dilaksanakan disertai dengan variabel yang lainnya dengan lebih menekankan pada *performance* kebijakan itu sendiri (Budi, 2014), Kedua pakar ini menegaskan pandangannya bahwa perubahan, kontrol dan kepatuhan tindakan merupakan merupakan hal-hal yang penting dalam proses implementasi.

Hal ini berarti bahwa ketika perubahan itu terjadi meskipun relatif sedikit merupakan suatu keberhasilan dalam implementasi, sementara kesepakatan dan tuntutan dari para *implementor* terhadap tujuan dan capaian kinerjanya dilapangan relatif tinggi (Solichin, 2002). Pada posisi ini kepekaan *implementor* itu menjadi mutlak. Jika *implementor* tidak memahami tujuan kebijakan, serta sistem nilai dan mekanisme kebijakannya maka implementasi kebijakan tidak akan efektif. Secara rinci ada beberapa faktor yang sangat mempengaruhi proses implementasi kebijakan yang telah diputuskan dengan menggunakan model ini (Abdal, 2015) yaitu :

- a) Standar, tujuan dan sasaran kebijakan
- b) Tersedianya sumber daya yang memadai baik materiil maupun non-materiil
- c) Sinergitas komunikasi antar *implementor* /organisasi pelaksana dalam memahami tujuan kebijakan
- d) Karakteristik *implementor* dalam struktur birokrasi yang harus diselaraskan
- e) Kondisi sosial, ekonomi dan politik, yang cenderung mempengaruhi struktur organisasi
- f) Sikap dari *implementor* dalam melaksanakan kebijakan yang telah diputuskan

Kesemua faktor diatas akan berkorelasi langsung untuk membentuk sikap *implementor* terhadap kebijakan yang akan diimplementasikan, dan menentukan seberapa tinggi kinerja kebijakannya. Secara ilustratif model ini dapat gambaran pola hubungannya sebagai berikut:

Gambar 2.3 Model Implementasi Kebijakan



Sumber : Donald Van Meter dan Carl Van Horn 1975 dalam (Dwidjowijoto, 2003).

2.5 Panduan Implementasi Kurikulum Merdeka Madrasah

Implementasi Kurikulum Merdeka pada madrasah diterapkan secara bertahap mulai Tahun Pelajaran 2022/2023. Dalam mengimplementasikan Kurikulum Merdeka, madrasah dapat memilih dua opsi atau pilihan yaitu; Pertama, madrasah masih menggunakan kurikulum 2013, dengan menerapkan beberapa prinsip Kurikulum Merdeka. Dimana madrasah melakukan kreasi dan inovasi dalam mengembangkan kurikulum operasional madrasah sesuai visi, misi, tujuan dan target madrasah. Madrasah memiliki fleksibilitas dalam mengelola pembelajaran dan asesmen/penilaian sesuai dengan kebutuhan dan ketersediaan sumber daya yang dimiliki. Madrasah menerapkan pembelajaran berdiferensiasi dengan memberi layanan pembelajaran sesuai dengan kebutuhan peserta didik yang beragam bakat, minat dan kemampuannya. Madrasah melaksanakan pembelajaran kolaboratif berbasis proyek, terutama dalam Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila dan Profil Pelajar Rahmatan lil Alamin.

Kedua, madrasah melaksanakan Implementasi Kurikulum Merdeka secara penuh, artinya menerapkan standar kompetensi lulusan (SKL), standar isi (SI), capaian pembelajaran (CP) sesuai Kurikulum Merdeka. Madrasah melaksanakan spirit Kurikulum Merdeka dengan melakukan kreasi dan inovasi dalam pengembangan kurikulum operasional madrasah, pembelajaran dan asesmen, Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila dan Profil Pelajar Rahmatan lil Alamin, pembelajaran

kolaboratif, pembelajaran berdiferensiasi dan lain sebagainya. Berikut mekanisme IKM pada madrasah (Panduan IKM, 2022):

1. Pada tahap awal, madrasah secara mandiri melakukan berbagai persiapan untuk melaksanakan Implementasi Kurikulum Merdeka (IKM), diantaranya:
 - a) Mengadakan atau mengikuti kegiatan sosialisasi IKM;
 - b) Melakukan analisis/identifikasi sumber daya madrasah yang mendukung IKM;
 - c) Mengajukan usulan secara online melalui aplikasi PDUM dengan melampirkan: surat permohonan; sertifikat akreditasi Madrasah; surat pernyataan yang berisi kesediaan Madrasah melaksanakan Kurikulum Merdeka secara mandiri; Surat rekomendasi dari Kemenag Kabupaten/Kota; daftar kegiatan persiapan IKM yang sudah dan akan dilaksanakan di madrasah.
2. Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota melalui Seksi Pendidikan Madrasah/Penmad melakukan verifikasi usulan dari madrasah, dan memberikan rekomendasi bagi madrasah yang dipandang memiliki kesiapan yang cukup untuk mengimplementasikan Kurikulum Merdeka.
3. Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi melakukan verifikasi berkas secara online pada aplikasi PDUM, terhadap madrasah yang mengusulkan IKM. Madrasah yang memenuhi persyaratan selanjutnya disetujui dan diusulkan kepada Direktorat Jenderal Pendidikan Islam untuk mendapat penetapan.
4. Direktorat Jenderal Pendidikan Islam menerima usulan madrasah yang telah diverifikasi oleh Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi dan melakukan verifikasi/uji petik usulan pada aplikasi PDUM dan selanjutnya menetapkan nama-nama madrasah pelaksana IKM.
5. Setelah ditetapkan sebagai pelaksana Kurikulum Merdeka, madrasah melakukan berbagai upaya penguatan kapasitas bagi pendidik maupun tenaga kependidikan, dengan cara mengikuti kegiatan Sosialisasi, Bimbingan Teknis, atau Pelatihan Implementasi Kurikulum Merdeka.

6. Kementerian Agama pusat, Kanwil Kemenag Provinsi dan Kemenag Kabupaten/Kota melakukan pendampingan terhadap madrasah pelaksana IKM secara bertahap dan berkelanjutan untuk mengoptimalkan peran seluruh warga madrasah dalam IKM.
 7. Kementerian Agama pusat, Kanwil Kemenag Provinsi dan Kemenag Kabupaten/Kota melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala pelaksana IKM pada madrasah, untuk mengetahui efektifitas pelaksanaan IKM dan dampaknya terhadap peningkatan mutu pendidikan di madrasah.
- Madrasah yang telah ditetapkan sebagai pelaksana Kurikulum Merdeka melaksanakan tahapan implementasi sebagai berikut:

1. Tahun Pertama

Pada tahun pelajaran 2022/2023, Kurikulum Merdeka diterapkan pada jenjang pendidikan dasar dan menengah, meliputi jenjang RA, MI, MTs, MA dan MAK secara terbatas pada madrasah *piloting*. Implementasi Kurikulum Merdeka pada jenjang RA untuk peserta didik kelompok usia 4 sampai 5 tahun, MI kelas 1 dan 4, MTs kelas 7, dan MA/MAK kelas 10. Sedangkan peserta didik kelas 2, 3, 5, 6, 8, 9, 11, dan 12 masih menggunakan kurikulum 2013.

2. Tahun Kedua

Pada tahun pelajaran 2023/2024, Kurikulum Merdeka pada jenjang RA diterapkan pada peserta didik usia 4 sampai 6 tahun, MI kelas 1, 2, 4, dan 5, MTs kelas 7 dan 8, dan MA kelas 10 dan 11. Sedangkan peserta didik kelas 3, 6, 9, dan 12 masih menggunakan kurikulum 2013.

3. Tahun Ketiga

Pada tahun pelajaran 2024/2025, Kurikulum Merdeka pada jenjang MI diterapkan pada peserta didik kelas 1, 2, 3, 4, 5, 6, jenjang MTs kelas 7, 8, 9 dan jenjang MA/MAK kelas 10, 11, 12. Sebagai catatan, bagi madrasah yang baru mengimplementasikan Kurikulum Merdeka pada tahun pelajaran 2023/2024, maka tahapan implementasi dimulai dari awal sebagaimana implementasi pada tahun pertama.

2.5.1 Kurikulum Madrasah Tsanawiyah

Kurikulum Madrasah Tsanawiyah adalah Kurikulum Pendidikan Dasar Berciri Khas Agama Islam sebagaimana ditentukan dalam Keputusan Menteri Agama Nomor 372 Tahun 1993 yang merupakan penjabaran dari UUSPN No. 2 Tahun 1989, PP 28 Tahun 1990, Keputusan Mendikbud No. 0487/u/1992 dan 054/u/1993. Dalam Keputusan Menteri Agama No. 372 Tahun 1993 dinyatakan bahwa Kurikulum Pendidikan Dasar Berciri Khas Agama Islam tersebut berlaku mulai tahun pelajaran 1994/1995 untuk kelas I dan IV bagi MI dan kelas I bagi MTs.

Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional, pasal 1 ayat (3) menyatakan “Sistem Pendidikan Nasional adalah satu keseluruhan yang terpadu dari semua satuan dan kegiatan pendidikan yang berkaitan satu dengan lainnya untuk mengusahakan tercapainya tujuan pendidikan nasional”. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar, pasal 4 ayat (3) menyatakan “Sekolah Dasar dan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama yang berciri khas agama Islam yang diselenggarakan Departemen Agama masing-masing disebut Madrasah Ibtidaiyah, Madrasah Tsanawiyah”.

Keputusan Menteri Agama Nomor 369 Tahun 1993 tentang Madrasah Tsanawiyah, Bab I pasal 1 poin 1 menyatakan “Madrasah Tsanawiyah selanjutnya dalam keputusan ini disebut MTs adalah Sekolah Lanjutan Tingkat pertama yang berciri khas agama Islam yang menyelenggarakan program 3 tahun setelah Madrasah Ibtidaiyah atau Sekolah Dasar. Selanjutnya dalam Keputusan Menteri Agama tersebut di atas pasal 7 ayat (1) angka 4 menyatakan “Penyelenggaraan Adminitrasi Madrasah meliputi : administrasi keuangan, ketenagaan, kesiswaan, perlengkapan, kurikulum dan perpustakaan”.

2.5.2 Struktur Kurikulum Merdeka Pada Madrasah Tsanawiyah

Struktur Kurikulum Merdeka pada tingkat Madrasah Tsanawiyah (MTs) secara umum terbagi menjadi 2 (dua), yaitu pembelajaran instrakurikuler dan pembelajaran berbasis proyek untuk penguatan karakter profil pelajar pancasila.

Namun dalam implementasinya di madrasah pembelajaran intrakurikuler dan pembelajaran berbasis proyek dapat dilaksanakan sebagai satu kesatuan, bahkan memungkinkan diselenggarakan lintas mata pelajaran pada MTs (Madrasah Tsanawiyah).

Bagaimana Struktur Kurikulum Merdeka Pada MTs (Madrasah Tsanawiyah). Struktur kurikulum MTs terdiri atas 2 (dua) fase yaitu Fase D dan E. Fase D yaitu untuk kelas VII dan kelas VIII, sedangkan fase E pada kelas IX. Madrasah dapat mengorganisasikan muatan pembelajaran intrakurikuler dan pembelajaran berbasis proyek secara terpadu atau simultan. Dalam kaitan ini madrasah dapat menggunakan atau memilih pendekatan mata pelajaran atau tematik secara bebas sesuai kebutuhan pembelajaran siswa yang diprogramkan. Bentuk pembelajaran dapat dilakukan secara kolaboratif beberapa mata pelajaran dalam mendukung satu tema yang di dalamnya dikelola melalui pembelajaran berbasis proyek, sehingga capaian intrakurikuler dapat diwujudkan sekaligus penguatan karakter Pelajar Pancasila.

Implementasi Kurikulum Merdeka di madrasah sudah dimulai sejak tahun pelajaran 2022/2023 di sejumlah madrasah yang ditunjuk oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Islam sebagai madrasah percontohan (*ploting*) penerapan kurikulum merdeka. Pada tahun pertama ini dipilih sejumlah 2.571 madrasah dari jenjang RA, MI, MTs, dan MA/MAK yang tersebar di seluruh Indonesia sebagai madrasah pelaksana Kurikulum Merdeka. Kebijakan ini tertuang dalam Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam No. 3811 Tahun 2022 tentang Madrasah Pelaksana Kurikulum Merdeka Tahun Pelajaran 2022/2023.

Untuk mendukung keberhasilan penerapan Kurikulum Merdeka pada madrasah, hendaknya diperhatikan beberapa komponen kurikulum yang harus dipahami dan dikuasai oleh guru madrasah. Dalam panduan pembelajaran dan asesmen Kurikulum Merdeka yang dikeluarkan oleh Direktorat KSKK Madrasah, ada sejumlah langkah yang harus dilakukan oleh guru madrasah calon pengampu mata pelajaran, seperti memahami capaian pembelajaran (CP), merumuskan alur tujuan pembelajaran (ATP), melaksanakan proyek penguatan profil pelajar pancasila *rahmatan lil alamin*, serta asesmen pembelajaran.

Keputusan Mendikbud Ristek No. 262/M/2022 sebagai perubahan atas Keputusan Mendikbud Ristek No. 56/M/2022 memuat informasi mengenai pedoman kurikulum, struktur kurikulum, asesmen, serta proyek penguatan profil pelajar Pancasila.²² Sedangkan Capaian Pembelajaran (CP) diatur dalam Keputusan Kepala BSKAP No. 008/H/KR/2022 Tahun 2022. Kemudian aspek dimensi, elemen, dan sub elemen profil pelajar pancasila tertuang dalam Keputusan Kepala BSKAP No. 009/H/KR/2022 Tahun 2022. Berikut ini Struktur Kurikulum Merdeka Pada MTs (Madrasah Tsanawiyah) yang dapat dilihat pada tabel 2.3.

Tabel 2.3 Struktur Kurikulum Merdeka Pada MTs (Madrasah Tsanawiyah)

Mata Pelajaran	Alokasi Per Tahun	
	VII-VIII	IX
Pendidikan Agama Islam:		
a. Al Quran hadist	72(2)	64 (2)
b. Akidah Ahlak	72(2)	64 (2)
c. Fikih	72(2)	64 (2)
d. SKI	72(2)	64 (2)
Bahasa Arab	180(3)	96(3)
Pendidikan Pancasila	72 (2)	96(3)
Bahasa Indonesia	180 (5)	192 (6)
Matematika	144 (4)	160 (5)
Ilmu Pengetahuan Alam	144 (4)	160 (5)
Ilmu Pengetahuan Sosial	108 (3)	128 (4)
Bahasa Inggris	108 (3)	128 (4)
Pendidikan Jasmani Olahraga dan Kesehatan	72 (2)	96(3)
Informatika	72 (2)	96 (3)
Mata Pelajaran Seni dan Prakarya**	72 (2)	96 (3)
1. Seni Musik		
2. Seni Rupa		
3. Seni Teater		
4. Seni Tari		
Prakarya (Budidaya, kerajinan, Rekayasa, atau Pengolahan)		
Muatan Lokal	72 (2)	94 (2)
Total****	1440(40)	1568(49)

(Sumber: Pedoman Implementasi Kurikulum Merdeka Pada Madrasah, 2022)

Pada Tabel 2.3 menunjukkan bahawa perhitungan waktu disampaikan dalam satu tahun, madrasah dalam memanfaatkan waktu yang tersedia dapat merencanakan sendiri menjadi setiap minggu, dua mingguan, tiga mingguan, bulanan atau bahkan secara blok materi dengan memanfaatkan waktu yang diperlukan untuk mewujudkan capaian pembelajaran. Pertimbangannya adalah efektivitas pembelajaran yang hendak dicapai oleh setiap mata pelajaran atau kolaboratif beberapa mata Pelajaran.

Angka dalam kurung, contoh (2), (3), (5) atau lainnya hanya merupakan alat perhitungan perpekan, bukan satuan waktu yang harus ditempuh dalam satu pekan. Dalam hal ini madrasah memiliki kewenangan yang bebas berdasarkan kebutuhan belajar siswa dalam memperhitungkan kebutuhan waktu belajar siswa. Madrasah dapat memperhitungkan waktu berdasarkan pekan atau capaian pembelajaran berdasarkan efektivitas kebutuhan belajar siswa

Pada tabel diatas juga menunjukkan asumsi 1 Tahun = 36 pekan dan 1 JP = 40 menit untuk kelas VII -VIII dan asumsi 1 Tahun = 32 pekan dan 1 JP = 40 menit untuk kelas IX . Kemudian pada tabel tersebut menjelaskan Satuan pendidikan menyediakan minimal 1 (satu) jenis seni atau prakarya (Seni Musik, Seni Rupa, Seni Teater, Seni Tari, dan/atau Prakarya). Peserta didik memilih 1 (satu) jenis seni atau prakarya yang diprogramkan madrasah dan total JP tidak termasuk mata pelajaran Muatan Lokal dan/atau mata pelajaran tambahan yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan.

Satuan pendidikan penyelenggara pendidikan inklusif di MTs menyediakan layanan program kebutuhan khusus sesuai kondisi peserta didik berdasarkan hasil asesmen. Dan beban belajar bagi penyelenggara pendidikan dengan Sistem Kredit Semester (SKS) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai SKS. Kemudian Madrasah dapat melakukan penambahan dan/atau relokasi jam pelajaran sesuai dengan kebutuhan dan ketersediaan waktu di madrasah dan Madrasah dapat menentukan model pembelajarannya sesuai kebutuhan belajar siswa, misalnya pembelajaran konvensional, pembelajaran berbasis proyek untuk satu mata pelajaran atau kolaborasi beberapa mata pelajaran dengan berbasis tema, pembelajaran model

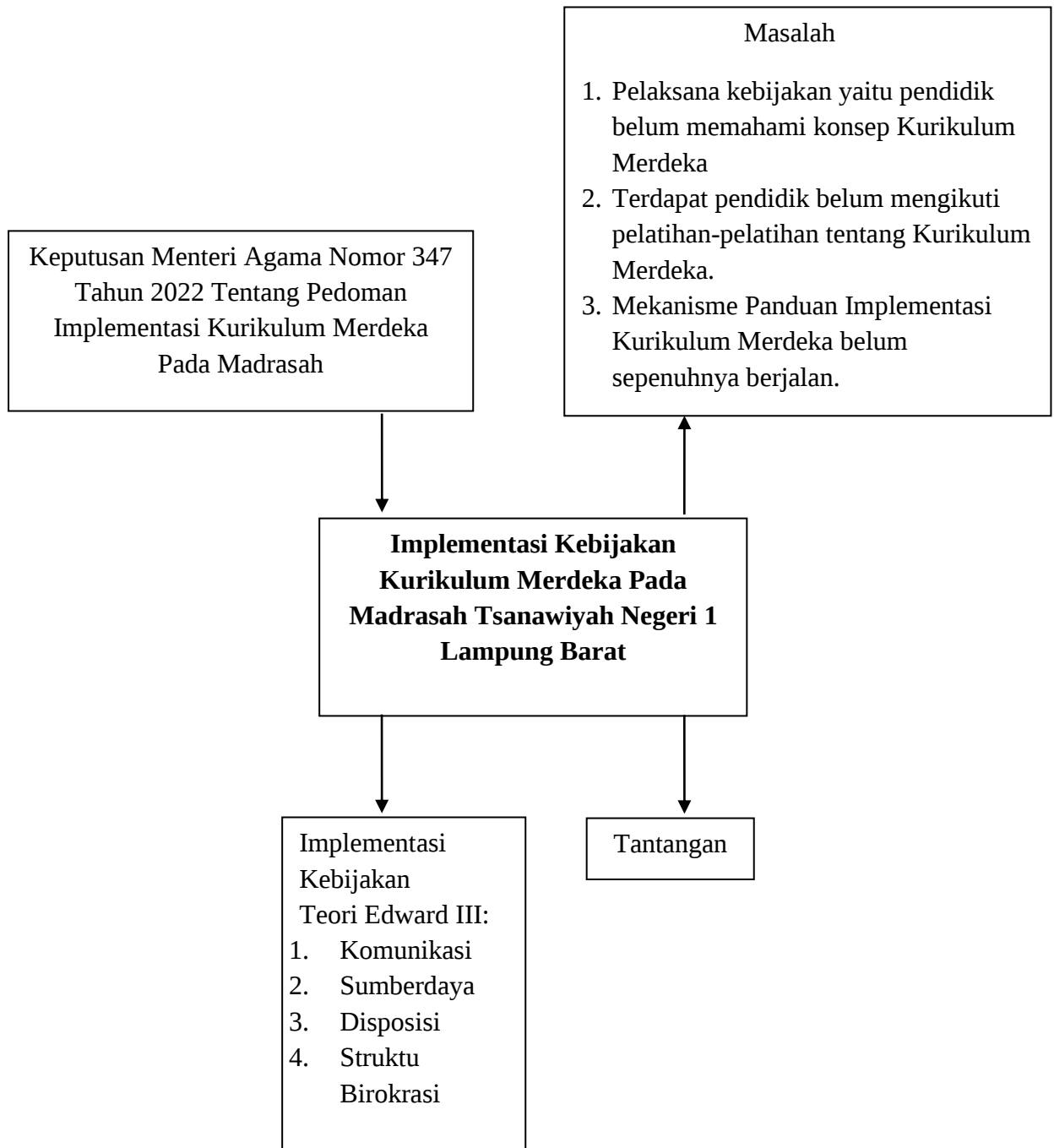
blok untuk satu kompetensi dalam satuan waktu tertentu, atau inovasi lain yang dirancang oleh madrasah.

2.6 Kerangka Berpikir

Implementasi Kurikulum Merdeka diterapkan sebagai langkah untuk menghadapi krisis pembelajaran yang telah lama berlangsung. Selain itu, hasil tes baik di tingkat global maupun nasional menunjukkan bahwa pendidikan di Indonesia belum mencapai hasil yang memuaskan. Misalnya, hasil tes *Programme for International Student Assessment* (PISA) menunjukkan bahwa kemampuan siswa Indonesia dalam literasi, matematika, dan sains masih jauh di bawah rata-rata global. Hal ini menandakan adanya tantangan yang signifikan dalam mencapai standar pendidikan yang memadai.

Implementasi Kurikulum Merdeka (IKM) pada madrasah secara utuh mengikuti kebijakan dari Kemendikbudristek. Namun, Kementerian Agama (Kemenag) melakukan adaptasi sesuai dengan kebutuhan pembelajaran di madrasah, dengan fokus pada penguatan Pendidikan Agama Islam dan Bahasa Arab, yang merupakan ciri khas dari madrasah tersebut dan dikeluarkannya KMA Nomor 347 Tahun 2022 tentang Pedoman Implementasi Kurikulum Merdeka pada Madrasah. Untuk menganalisis pelaksanaan program Kurikulum Merdeka tersebut, peneliti menggunakan model Implementasi George C, Edward III. Adapun indikator-indikator yang digunakan yaitu: komunikasi, sumber daya, disposisi/sikap, dan struktur birokrasi. Adapun pedoman dalam mempermudah kegiatan penelitian ini dan juga menganalisis hasil penelitian, maka dibuat kerangka pemikiran sebagai berikut.

Gambar 2.4. Kerangka Berpikir



(Sumber: diolah peneliti, 2025)

III. METODE PENELITIAN

3.1. Pola Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif deskriptif, penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada *filasafat postpositivisme*, digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, pengambilan sampel sumber data dilakukan menggunakan teknik snowball, teknik pengumpulan dengan triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi (Sugiyono, 2017). Penelitian ini disebut penelitian deskriptif karena menghasilkan data berupa gambaran dengan kata-kata dan melukiskannya mengenai implemetasi kebijakan Kurikulum Merdeka pada MTs Negeri 1 Lampung Barat.

3.2 Fokus Penelitian

Fokus Penelitian dimaksudkan sebagai batasan masalah untuk membatasi studi dalam penelitian guna memilih mana data yang relevan dan mana yang tidak relevan. Penelitian ini berfokus pada implementasi kebijakan Kurikulum Merdeka di MTs N 1 Lampung Barat yang terdiri dari dua point utama yaitu:

1. Implementasi Kurikulum Merdeka pada Madrasah Tsnawiyah Negeri 1 Lampung Barat dengan menggunakan teori Edward III (1980) yang terdiri dari keempat unsur, yaitu:
 - a. Komunikasi
Komunikasi antar *stakeholder*, seperti Kementerian Agama Kabupaten Lampung Barat, dan MTs N 1 Lampung Barat. Komunikasi merupakan hal penting untuk mencapai keberhasilan kebijakan.

Penelitian ini melihat dari komunikasi formal dan eksternalnya dalam mendukung implementasi kebijakan Kurikulum Merdeka di MTs N 1 Lampung Barat dengan memperhatikan transmisi, konsistensi, dan kejelasan.

b. Sumber daya

Sumber daya yang memadai diperlukan untuk melaksanakan kebijakan pilihan pemerintah. Sumber daya yang ada, berupa: keuangan, manusia antara lain personel (aparatur), serta fasilitas untuk mendukung Kurikulum Merdeka di MTs N 1 Lampung Barat.

c. Disposisi

Kebijakan publik dapat dipengaruhi oleh sikap dan komitmen pelaksana kebijakan, yaitu pegawai yang melaksanakannya ditunjukkan dengan pemahaman terhadap langkah-langkah yang diambil dan kemampuan untuk melaksanakannya, serta kesamaan pemahaman dalam mengimplementasikan kebijakan publik. Penelitian ini melihat komitmen dari MTs N 1 Lampung Barat.

d. Struktur Birokrasi

Struktur birokrasi adalah susunan sistematis yang menunjukkan pembagian tugas, wewenang, dan tanggung jawab. Oleh karena itu, organisasi harus memiliki struktur birokrasi yang detail. Penelitian ini melihat struktur birokrasi MTs N 1 Lampung Barat dalam mengimplementasikan Kurikulum Merdeka.

2. Tantangan yang dihadapi dalam Implementasi Kurikulum Merdeka pada MTs N 1 Lampung Barat.

3.3 Lokus Penelitian

Penelitian ini berlokasi di Madrasah Tsanawiyah Negeri (MTs N) 1 Lampung Barat, yang merupakan salah satu institusi pendidikan di bawah Kementerian Agama Republik Indonesia. MTs N 1 Lampung Barat dipilih sebagai lokus penelitian karena merupakan salah satu madrasah yang menerapkan Kurikulum Merdeka di Lampung Barat sejak diberlakukannya peraturan pemerintah tentang pelaksanaan program kurikulum tersebut.

3.4 Sumber Data Penelitian

Adapun menurut Sugiyono (2017) data hasil penelitian didapatkan melalui dua sumber data, yaitu:

1. Data Primer

Data primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data. Pengumpulan data primer dalam penelitian ini diperoleh melalui wawancara langsung dengan narasumber.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau lewat dokumen. Dalam penelitian ini, data sekunder tersebut berupa data-data pendukung yang diperoleh dari MTs N 1 Lampung Barat, jurnal, buku, dokumen, arsip, gambar yang berkaitan.

3.5 Informan Penelitian

Penentuan informan dalam penelitian ini berdasarkan pada kriteria sebagai berikut:

1. Subjek aktif terlibat di lingkungan yang menjadi sasaran penelitian,
2. Subjek bersedia dan mempunyai waktu untuk dimintai informasi oleh peneliti,
3. Subjek dapat memberikan informasi yang sebenarnya sesuai kebutuhan peneliti (Sugiyono, 2017). Secara rinci informan penelitian sebagai berikut:

Tabel 3.1. Informan Penelitian

Sumber Data	Kode	Jumlah
Pengawas Madrasah	PM	1
Tim Penjamin Mutu Madrasah	TPM	1
Kepala Sekolah	KP	1
Wakil Kepala Sekolah	WKP	2
Pendidik / Guru	PNS	5
Total		10

(Sumber: diolah peneliti, 2025)

Berdasarkan kriteria tersebut, maka ditentukanlah subjek penelitian sebagai berikut:

1. Pengawas MTs Negeri 1 Lampung Barat.
2. Tim Penjamin Mutu Madrasah MTs Negeri 1 Lampung Barat.
3. Kepala Sekolah MTs Negeri 1 Lampung Barat Ibu Desi Arisandi, S.Pd.I, MM.Pd
4. Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum MTs Negeri 1 Lampung Barat
5. Pendidik atau Guru MTs Negeri 1 Lampung Barat

Snowball sampling adalah teknik pengambilan sampel sumber data, yang pada awalnya jumlahnya sedikit, lama-lama menjadi besar. Hal ini dilakukan karena dari jumlah sumber data yang sedikit itu tersebut belum mampu memberikan data yang lengkap, maka mencari orang lain lagi yang dapat digunakan sebagai sumber data. Dengan demikian jumlah sampel sumber data akan semakin besar, seperti bola salju yang menggelinding, lama-lama menjadi besar (Moleong, 2018).

Hal tersebut dilakukan dengan tujuan untuk mendapatkan akurasi data yang diperoleh. Adapun informan yang menjadi informan kunci (*key informan*) pada penelitian ini adalah Kepala Sekolah dan data informan lainnya. Kemudian informan tambahan didapatkan dari rekomendasi dari informan kunci pada penelitian ini.

3.6 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Observasi

Observasi diartikan sebagai pengamatan dan pencatatan secara sistemik terhadap gejala yang tampak pada objek penelitian. Pengamatan dan pencatatan yang dilakukan terhadap objek di tempat terjadi atau berlangsungnya peristiwa, sehingga peneliti berada bersama objek yang diselidiki, disebut observasi langsung. Sedangkan observasi tidak langsung adalah pengamatan yang dilakukan tidak pada saat berlangsungnya peristiwa tersebut diamati melalui film, rangkaian slide, atau rangkaian foto (Creswell & Poth, 2018).

2. Wawancara

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara (*interviewee*) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu. Maksud mengadakan wawancara antara lain mengkonstruksikan mengenai orang, kejadian, organisasi, perasaan, motivasi, dan lain-lain (Moleong, 2018). Wawancara yang dilakukan oleh peneliti akan melibatkan beberapa informan. Peneliti juga menyiapkan beberapa pertanyaan yang akan ditanyakan langsung kepada informan.

Kemudian peneliti atau penulis akan menggunakan metode mencatat hasil wawancara yang telah penulis dapatkan, merekam dalam bentuk suara sebagai pedoman dan penguat data. Wawancara dalam penelitian ini dilakukan untuk memperoleh data dan informasi mengenai implemetasi kebijakan Kurikulum Merdeka pada MTs Negeri 1 Lampung Barat. Wawancara ditujukan kepada subjek penelitian. Alat bantu yang akan digunakan saat wawancara yaitu alat tulis, panduan wawancara dan alat perekam.

3. Dokumentasi

Menurut Sugiyono (2017), dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang telah berlalu dalam bentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. Dokumentasi dalam penelitian ini digunakan sebagai

penunjang dan pelengkap yang berhubungan dengan masalah penelitian untuk melengkapi data dari hasil observasi dan wawancara.

Dokumentasi ini digunakan untuk mengumpulkan data yang berasal dari data tertulis, arsip, foto, video, dan lain-lain sebagai bahan pendukung dan menambah kepercayaan dalam pembuktian kejadian penelitian yang telah dilakukan. Foto berfungsi sebagai data atau sebagai pendorong kearah data menghasilkan data pengamatan. Alat bantu yang akan digunakan saat dokumentasi yaitu kamera. Objek yang akan diambil dalam dokumentasi ini adalah kondisi sekolah, kondisi guru, perangkat pembelajaran dan alat peraga dalam pembelajaran.

3.7 Teknik Analisis Data

Menurut Miles dan Huberman (1992), teknik analisis data adalah suatu pendekatan sistematis untuk mengelola dan menginterpretasikan data kualitatif dengan tujuan menemukan tema, pola, dan hubungan yang bermakna dalam data tersebut. Analisis data ini terdiri dari tiga alur kegiatan utama yang berlangsung secara simultan dan saling berinteraksi yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik analisis data Miles and Huberman dengan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Reduksi Data

Mereduksi data berarti menyederhanakan, memilih informasi penting, serta mengidentifikasi tema dan pola yang muncul. Dalam proses ini, peneliti merangkum data yang diperoleh dari lapangan, kemudian memusatkan perhatian pada informasi yang relevan untuk menemukan tema dan pola tertentu. Proses ini melibatkan penajaman dan pengelompokan data. Penajaman dilakukan dengan mengubah kalimat-kalimat panjang menjadi pernyataan yang lebih ringkas, sedangkan pengelompokan data dilakukan dengan menyatukan data sejenis dan mencari keterkaitannya. Proses reduksi data diperoleh setelah peneliti melakukan wawancara, mendapatkan data tertulis yang ada di MTs Negeri 1 Lampung Barat, yang data hasil wawancara dipilah untuk

mendapatkan fokus penelitian terkait Implementasi Kurikulum Merdeka di MTs Negeri 1 Lampung Barat.

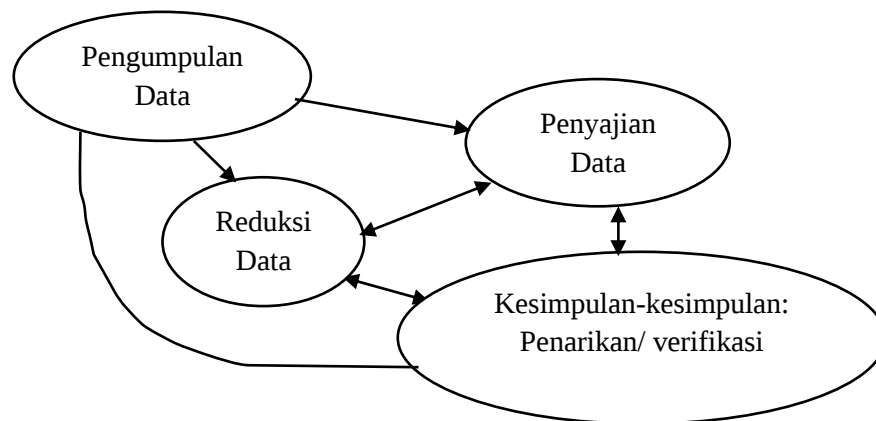
2. Data *Display* (Penyajian Data)

Penyajian data dilakukan setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah *men-display* data, berguna untuk melihat gambaran secara keseluruhan hasil penelitian, baik yang berbentuk matrik atau pengkodean. Kemudian dari hasil reduksi data dan display data itulah selanjutnya peneliti dapat menarik suatu kesimpulan dan memverifikasi sehingga menjadi kebermanaan data. Pada penelitian ini penyajian data yang berhubungan dengan Implementasi Kuriulum Merdeka di MTs Negeri 1 Lampung Barat dengan menggunakan teks naratif, atau tabel, foto dan grafik agar mudah memahami apa yang terjadi dilapangan.

3. *Conclusion Drawing* (Penarikan Kesimpulan)

Kesimpulan merupakan langkah terakhir dalam penelitian kualitatif. Untuk menetapkan kesimpulan, maka verifikasi dilakukan sepanjang penelitian berlangsung sejalan dengan *member check*. Setelah verifikasi selesai maka dilakukan pembahasan hasil temuan di lapangan. Hasil temuan di lapangan disesuaikan dengan teori yang ada untuk mendapat kesesuaian dan mendapatkan kesimpulan akhir. Pada tahap ini peneliti menarik kesimpulan dari data yang telah dikumpulkan pada saat pengambilan data di MTs Negeri 1 Lampung Barat agar mendapatkan hasil optimal terkait *Implementor* dan *stakeholder* terkait Kurikulu Merdeka di MTs Negeri 1 Lampung Barat.

Gambar 3.1 Model Analisis Data Interaktif



(Sumber: Miles dan Huberman, 2014)

3.8 Teknik Keabsahan Data

Menurut Moleong (2018) terdapat empat kriteria keabsahan data dan teknik pemeriksaan keabsahan data yaitu:

a. *Credibility* (Derajat Kepercayaan)

Teknik pemeriksaan yang digunakan untuk meningkatkan derajat kepercayaan terhadap data adalah dengan memperpanjang keikutsertaan pada latar penelitian dan ketekunan pengamatan yang memungkinkan kedalaman penelitian, melakukan observasi, menganalisis fenomena, dan menggunakan teknik triangulasi. Triangulasi merujuk pada metode yang digunakan oleh peneliti untuk memverifikasi keabsahan data yang diperoleh melalui pendekatan beragam. Triangulasi yang digunakan adalah triangulasi sumber.

b. *Transferability* (Keteralihan)

Keteralihan secara substansial, mengacu pada validitas eksternal dalam penelitian kualitatif. Validitas ini dapat dicapai dengan menyajikan deskripsi yang terperinci dan komprehensif mengenai hasil dan konteks penelitian. Uji keteralihan peneliti pada penelitian ini memberikan uraian yang rinci, jelas dan sistematis serta dapat dipercaya mengenai Implementasi Kurikulum Merdeka di MTs Negeri 1 Lampung Barat.

c. *Dependability* (Ketergantungan)

Reliabilitas dalam penelitian kualitatif mengacu pada dependensi. Suatu penelitian dianggap dependabilitas ketika orang lain dapat mengulangi atau mereplikasi proses penelitian tersebut. Dalam penelitian kualitatif, pengujian dependabilitas dilakukan dengan mengaudit seluruh proses penelitian. Uji Ketergantungan dilakukan untuk mengetahui, membuktikan serta memastikan hasil penelitian terkait Implementasi Kurikulum Merdeka di MTs Negeri 1 Lampung Barat berjalan baik atau tidak. Pengujian data penelitian dilakukan oleh auditor independen atau pembimbing untuk mengaudit keseluruhan aktivitas peneliti dalam melakukan penelitian.

d. *Confirmability* (Kepastian)

Salah satu proses dalam menguji hasil penelitian dan dikaitkan dengan proses yang dilakukan apabila hasil penelitian merupakan fungsi dari proses penelitian. Uji kepastian sama seperti uji ketergantungan, sehingga proses pengujiannya dapat dilakukan secara bersamaan (Sugiyono, 2017). Pada tahap ini peneliti menjelaskan proses awal hingga akhir penelitian mengenai Implementasi Kurikulum Merdeka di MTs Negeri 1 Lampung Barat.

V. KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Penelitian ini dilakukan untuk mendeskripsikan dan menganalisis proses Implementasi dan tantangan Kurikulum Merdeka di Madrasah Tsanawiyah Negeri 1 Lampung Barat. Maka kesimpulan pada penelitian ini sebagai berikut:

1. Komunikasi dalam proses menginformasikan mengenai proses dan evaluasi pembelajaran dalam Kurikulum Merdeka kepada para pelaksana kebijakan di Madrasah Tsanawiyah Negeri 1 Lampung Barat belum sepenuhnya maksimal karena hal tersebut belum sepenuhnya di jelaskan sehingga para pendidik belum paham mengenai proses pembelajaran pada kurikulum merdeka.
2. Sumberdaya pada segi sumberdaya manusia, sumberdaya fasilitas dan sumberdaya pendanaan yang ada di Madrasah Tsanawiyah Negeri 1 dalam mewujudkan tujuan kurikulum merdeka sudah memadai dan harus terus dikembangkan secara berkelanjutan agar madrasah dapat mewujudkan pembelajaran yang inovatif, kreatif, dan berpusat pada kebutuhan serta potensi siswa.
3. Disposisi atau karakter pendidik telah memiliki komitmen yang baik, namun komitmen tersebut masih perlu meperhatikan motivasi kerja, peran pimpinan, pengawasan yang efektif, serta evaluasi dari pihak terkait mengenai Kurikulum Merdeka.
4. Stuktur birokrasi atau pembagian tugas dan tanggungjawab antar bagian implementasi Kurikulum Merdeka di Madrasah Tsanawiyah Negeri 1 sudah baik, hanya saja masih perlu adanya regulasi atau standar operasional prosedur yang jelas sehingga memudahkan pelaksana dalam menjalankan tugas.

5. Tantangan yang di hadapi yaitu fleksibilitas waktu dalam menghadapi paradigma baru pada pembelajaran, pemahaman mengenai arah dan tujuan kurikulum, personalitas pendidik dan media pembelajaran dalam era digitalisasi.

5.2 Saran

1. Perlu adanya optimalisasi dimensi komunikasi seperti menggunakan forum diskusi rutin, rapat koordinasi, serta media komunikasi digital (grup telegram dan email) agar seluruh pihak terlibat dapat saling bertukar informasi dan feedback secara cepat.
2. Pengadaan *Forum Group Discussion* dengan *stakeholder* madrasah agar para pelaksana kebijakan dan pendidik selalu mendapatkan pembaruan pengetahuan dan motivasi mengenai pemahaman mendalam tentang Kurikulum Merdeka, praktik terbaik implementasi kurikulum, strategi pembelajaran inovatif sesuai dengan kurikulum, serta peningkatan komitmen dan peran aktif dalam pelaksanaan kebijakan pendidikan.
3. Penggunaan teknologi dan fasilitas yang mendukung seperti penggunaan laptop, tablet, atau smartphone untuk mengakses bahan ajar digital, kuis interaktif (Kahoot, Quizizz), Video pembelajaran, animasi, terus dioptimalkan untuk menunjang pelaksanaan kurikulum.
4. Disarankan agar pihak madrasah dan pembuat kebijakan melakukan evaluasi berkala per 6 bulan sekali terhadap pelaksanaan guna memperbaiki kendala yang ada.

DAFTAR PUSTAKA

- Agus Salim Chamidi. (2022). Penguatan Implementasi Kurikulum Merdeka di Sekolah/Madrasah melalui Bimtek Model In-On-In. *Jurnal Pendidikan Masyarakat Dan Pengabdian*, 2(4), 1267-1276.
- Agus Subianto M. (2020). Kebijakan Publik Tinjauan Perencanaan, Implementasi dan Evaluasi. Surabaya. Brilliant, PT Menuju Insan Cemerlang.
- Aini Qolbiyah, Sonzarni, & Muhammad Aulia Ismail. (2022). Implementation Of The Independent Learning Curriculum At The Driving School. *Jurnal Penelitian Ilmu Pendidikan Indonesia*, 1(1), 01–06. <https://doi.org/10.31004/jpion.v1i1.1>
- Aini Qurrotul, Adiwiyono. (2023). Implementation of an Independent Curriculum in Supporting Students' Freedom to Create and Learn. *JSRET (Journal of Scientific, Research, Education, and Technology)*, 3 (2)
- Ainia, D.K., (2020) MerdekaBelajar Dalam Pandangan Ki Hadjar Dewantara Dan Relevansinya Bagi Pengembangan Pendidikan Karakter. *J. Filsafat Indonesia*., 3(3), 95-101 <https://doi.org/10.23887/jfi.v3i3.24525>.
- Alaslan, Amtai. (2021). *Formulasi Kebijakan Publik: Studi Relokasi Pasar*. Purwokerto: CV Pena Persada
- Alwi, R., & Indriyani, R. (2023). Analisis Implementasi Program Kurikulum Merdeka Belajar sebagai Strategis Peningkatan Mutu Pendidikan. *Jurnal Al-Mubin*, 6(1), 67–73.
- Amiruddin, Prasetya, I., Sadikin, A., Sidabutar, T., Banurea, T., & Nasution, A. (2023). Keterkaitan Pengembangan Kurikulum dengan Kurikulum Sekarang. *Jurnal Penelitian, Pendidikan dan Pengajaran (JPPP)*, 4(1), 19-24. <https://doi.org/10.30596/jppp.v4i1.13612>
- Arifa, F. N. (2022). Implementasi Kurikulum Merdeka dan Tantangannya. *Info Singkat: Kajian Singkat Terhadap Isu Aktual Dan Strategis*, 14(9), 25–30.
- Arifin Tahir. (2015). *Kebijakan Publik & Transparansi Penyelenggara Pemerintah Daerah*. ALFABETA. CV

- Dariyono. (2023). Evaluasi Implementasi Kurikulum Merdeka pada Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Malili. Universitas Pendidikan Indonesia. Diakses dari repository.upi.edu/perpustakaan.upi.edu.
- Djufri, I. (2021). Tantangan Merdeka Belajar Di Daerah 3T. In *Merdeka Belajar: Merdeka Mengajar*2. Yayasan Kita Menulis.
- Dye, Thomas R, (2005). *Understanding Public Policy, Eleventh Edition*. New Jersey: Pearson Prentice Hall.
- Efyanto, D. W. I. (2021). Analisis Penerapan Kebijakan Merdeka Belajar pada Kurikulum SMK. Universitas Muhammadiyah Malang.
- Fitra, D. (2023). Kurikulum Merdeka dalam Pendidikan Modern. *Jurnal Inovasi Edukasi*. Volume 06, No.02. <https://ejournal.uas.ac.id/index.php/auladuna/article/download/1248/591>
- Hahekaya, E., & Pollatu, D, (2022). Problematika Guru Dalam Mengimplementasikan Kurikulum Merdeka. *Jurnal Pendidikan*. DIDAXEI ISSN Online: 2745-6935. Volume 3, No.02. <https://ejournal.iaknambon.ac.id/index.php/DX/article/download/617/292>
- Idhartono, Amel R. (2023). Literasi Digital Pada Kurikulum Merdeka Belajar Bagi Anak Tunagrahita. *Jurnal Teknologi Pembelajaran*. <https://jurnal.unipasby.ac.id/index.php/devosi/article/download/6150/4190>
- Islamy, M. Irfan. (2000). *Prinsip-prinsip Perumusan Kebijakan Negara*. Jakarta. Sinar Grafika
- Kadji, Yulianto. (2015). *Formulasi dan Implementasi Kebijakan Publik: Kepemimpinan dan Perilaku Birokrasi dalam Fakta Realitas*. Gorontalo: UNG Press
- Keputusan Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Nomor 3811 Tahun 2022 tentang Madrasah Pelaksana Kurikulum Merdeka Tahun Pelajaran 2022/2023.
- Keputusan Menteri Agama Nomor 347 Tahun 2022 tentang Pedoman Implementasi Kurikulum Merdeka pada Madrasah.
- Kurikulum Oprasional Madrasah 2022
- Kurikulum Oprasional Madrasah 2024
- Langke, R. (2021). Implementasi merdeka belajar di Madrasah. *Journal of Islamic Education Leadership*, 1(2), 125-135.

- Lazwardi, D. (2017). Manajemen Kurikulum sebagai Pengembangan Tujuan Pendidikan. *Al-Idarah: Jurnal Kependidikan Islam*, 7(1), 119–125.
- Marzuki, K., Amir, R., & Gaffar, F. (2022). Implementasi Kebijakan Merdeka Belajar pada Satuan Pendidikan Nonformal. *Membangun Negeri Dengan Inovasi Tiada Henti Melalui Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat*.
- Miles, M.B, Huberman, A.M, dan Saldana, J. 2014. *Qualitative Data Analysis, A Methods Sourcebook, Edition 3*. USA: Sage Publications. Terjemahan Tjetjep Rohindi Rohidi, UI-Press
- Mohammad D, M & Abu Hasan. (2022). The Implementation Of An Independent Curriculum In Improving The Quality Of Madrasah Education. *International Journal for Studies on Children, Women, Elderly and Disabled*, 17(4)
- Moleong, Lexy J. (2018). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Muammar, Candra Wijaya, Yusuf Hadijaya. (2024). Implementation of the Independent Learning Curriculum Policy at MAN 2 Langkat. *Didaktika: Jurnal Kependidikan*, 13(3)
- Mujab, S., Rosa, A. T. R., & Gumelar, W. S. (2023). Analisis Implementasi Kurikulum Merdeka (Studi Kasus SMK Al Huda Kedungwungu Indramayu). *Jurnal Pendidikan Dan Konseling*, 5(1), 1538–1545.
- Muqorobin. (2023). Tantangan Dalam Penerapan Kurikulum Merdeka. Tersedia dalam <https://kspstendik.kemdikbud.go.id/read-news/tantangan-dalam-penerapan-kurikulum-merdeka>.
- Mustari, N. (2015). *Pemahaman Kebijakan Publik (Formulasi, Implementasi dan Evaluasi Kebijakan Publik)*, Kebijakan Publik Deliberatif. Yogyakarta: Leutikaprio.
- Osborne, David dan Pastrick, Peter. (2000). *Memangkas Birokrasi: lima Strategi Menuju Pemerintahan Wirausaha*. Jakarta; PPM, edisi revisi
- Panduan Implementasi Kurikulum Merdeka 2022
- Pelupessy, I., & Dermawan, H. (2021). Analisis Implementasi Kurikulum Merdeka di Sekolah Penggerak Sekolah Dasar. *Assabiah: Jurnal of Madrasah Ibtidaiyah Teacher Education*, 20(60), 34–42.

- Putra, S. K., & Mei, R. (2021). Konsep manajemen sumber daya manusia dan praktiknya di lembaga pendidikan. *NAZZAMA: Journal of Management Education*, 1(1), 63.
- Ridho Khairul A.S, Mesiono, Makmur Syukri. (2024). Madrasah Head Strategies In Implementing The Independent Curriculum Atman Batu Bara. *Tadrib: Jurnal Pendidikan Agama Islam*. 10(1), 417-427
- Rusman. (2018). *Model-Model Pembelajaran: Mengembangkan Profesionalisme Guru*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Sartini, & Mulyono, R. (2022). Analisis Implementasi Kurikulum Merdeka Belajar untuk Mempersiapkan Pembelajaran Abad 21. *Didaktik: Jurnal Ilmu PGSD FKIP UNiversitas Mandiri*, 8(2), 1348–1363.
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kualitatif, dan R dan D*. Bandung: Alfabeta.
- Suhartono, O. (2021). Kebijakan Merdeka Belajar dalam Pelaksanaan Pendidikan di Masa Pandemi Covid-19. *Ar-Rosikhun: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*, 1(1), 8–19.
- Sukmawati, R. & Farid, I. (2024). The role of madrasah principals in implementing the independent curriculum: A case at a State Islamic Senior High School in Central Java. *Tadibia Islamika*, 4(2), 75-84. <https://doi.org/10.28918/tadibia.v4i2.8730>
- Sumarsih, I., Marliyani, T., Hadiyansah, Y., Hernawan, A. H., & Prihantini, P. (2022). Analisis Implementasi Kurikulum Merdeka di Sekolah Penggerak Sekolah Dasar. *Jurnal Basicedu*, 6(5), 8248=8258.
- Sultoni, M. R., Setiawan, I., Apriliani, A., & Hermawan, D. (2024). Implementasi kebijakan kurikulum merdeka di SMP Amaliah Bogor dan SMPN 1 Dramaga. *Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan*, 5(3), 11765–11777.
- Tachjan. (2006). *Iplementasi Kebijakan Publik*. Bandung: AIPI
- Undang-Undang No. 12 Tahun 1958
- Wolfswinkel, J. F., Furtmueller, E., & Wilderom, C. P. M. (2013). Using grounded theory as a method for rigorously reviewing literature. *European Journal of Information Systems*, 22, 45–55.
- Zed, M. (2008). *Metode Penelitian Kepustakaan*. Yayasan Obor.